



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**RENCANA STRATEGIS [RENSTRA SKPD]  
TAHUN 2013 - 2018**



**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan di sektor transportasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan perekonomian di semua wilayah. Apalagi perkembangan teknologi transportasi saat ini berhubungan erat dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika. Jaringan transportasi terus berkembang dalam rangka mendukung distribusi arus barang dan perpindahan penumpang harus diikuti pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Pertumbuhan sektor transportasi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro, antara lain keberhasilan dalam pembangunan transportasi yang bersinergi akan berdampak pada ukuran nilai tambah dalam pembentukan Produk Domestik Brutto serta multiplier effect yang ditimbulkannya terhadap sektor-sektor lainnya. Selain itu juga dapat berdampak pada kemampuan dalam meredam laju inflasi dengan kelancaran arus distribusi barang hingga ke pelosok wilayah khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan perkembangan transportasi yang semakin modern dan dinamis, perlu dikaitkan dengan peran yang cukup penting dalam teknologi informasi untuk penyebarluasan informasi dasar bagi pengguna jasa transportasi. Teknologi informasi perlu dikembangkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat memberi pengetahuan bagi produk, organisasi, masyarakat dan pemerintah. Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka peran komunikasi publik sangat dominan dalam usaha mencerdaskan masyarakat. Komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui berbagai media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dalam teknologi informasi banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk menunjang kehidupan bermasyarakat yang berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk tampil gemilang dalam menghadapi persaingan global. Perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang semakin pesat mendorong peran strategis sebagai modal dasar pembangunan untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

Wilayah Sumatera Selatan mempunyai cakupan wilayah yang cukup besar atau sekitar 91.774,99 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm$  8,4 juta jiwa dengan pembagian wilayah administrasi terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Sumatera Selatan memiliki potensi energi serta hasil bumi yang cukup besar, harus memiliki sistem transportasi yang terintegrasi antar wilayah serta sustainable yang ramah lingkungan, dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ada harus mampu mengeksplorasi potensi yang ada. Sesuai dengan arahan dan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Selatan 2005 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap ketiga bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan diatas angka 6,5 persen/tahun. Untuk mendukung penguatan struktur ekonomi serta pertumbuhan ekonomi diatas, maka sektor transportasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan strategis.

Untuk itu peranan dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan bahwa SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Sebagai SKPD yang mempunyai 2 (dua) urusan pemerintahan, arah dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mendukung RPJMD tahap ketiga 2013 – 2018. Rencana Strategis (Renstra) SKPD diharapkan mengarah pada perbaikan sistem transportasi dengan pendekatan pembangunan infrastruktur perhubungan komunikasi dan informatika yang strategis.

Pembangunan infrastruktur perhubungan strategis mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu terwujudnya jaringan transportasi wilayah yang sustainable, multimoda, tumbuh merata serta keterpaduan multimoda yang bersifat massal. Adanya jaringan transportasi wilayah akan menimbulkan simpul-simpul transportasi yang strategis

diantaranya terminal, stasiun, pelabuhan serta bandar udara. Transportasi massal yang berteknologi tinggi diantaranya monorail Sumatera Selatan.

Penyempurnaan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) bidang perhubungan dilakukan dalam upaya meningkatkan baik keandalan maupun kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Kelaikan prasarana transportasi diantaranya ketersediaan :

1. Peningkatan jaringan transportasi jalan yang menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan serta simpul transportasi berupa terminal di setiap wilayah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan prasarana angkutan sungai yang menjangkau daerah terpencil;
3. Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan Laut Tanjung Api-api;
4. Pengembangan transportasi kereta api berupa monorail serta penyiapan jalur ganda (double track);
5. Peningkatan bandara SMB II, pengembangan bandara Atung Bungsu dan Silampari serta lanjutan lapangan terbang di Kabupaten Lahat

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika strategis mengarah ke fokus antara lain :

1. Perubahan sektor yang bertujuan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pos dan telematika serta iklim investasi yang kondusif;
2. Pengembangan infrastruktur pos, telekomunikasi, media, informatika yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di seluruh wilayah Sumatera Selatan serta memperkecil kesenjangan informasi dan menjamin kelancaran arus informasi;
3. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan efisien;
4. Tersedianya akses layanan komunikasi dan informatika yang modern melalui Sumatera Selatan Free Wi-fi Area serta mengurangi daerah blank spot informasi.

Fungsi disusunnya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Sebagai alat ukur untuk mendukung target pencapaian RPJMD tahap ketiga 2013 – 2018 Sumatera Selatan;
2. Sebagai acuan dasar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan periode waktu lima tahunan 2013 – 2018;

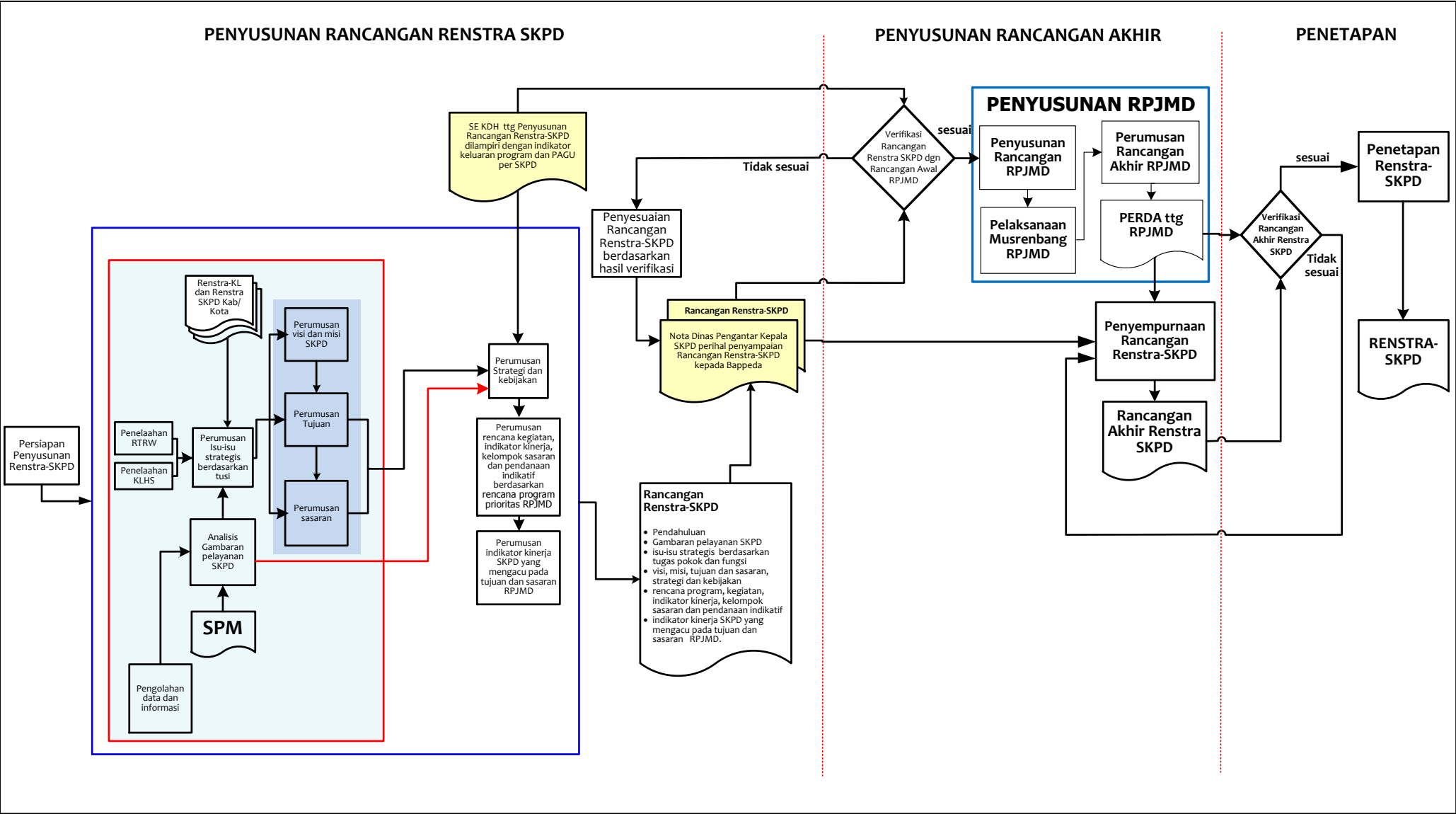
3. Sebagai acuan pembangunan bidang perhubungan komunikasi dan informatika serta sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dapat di gambarkan alur proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai berikut :

BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.

Gambar I.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Proses Penyusunan Renstra SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

Pembentukan Tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD. Susunan keanggotaan Tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing.

Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang/UPTD yang ada. Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD.

b. Orientasi Mengenai Renstra SKPD

Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi penyusunan Renstra SKPD bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja 5 (lima) tahunan pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan kewilayahan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen-dokumen lainnya yaitu :
  - a. Draft RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, dan Renstra K/L;
  - b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, draft RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L;
  - c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;

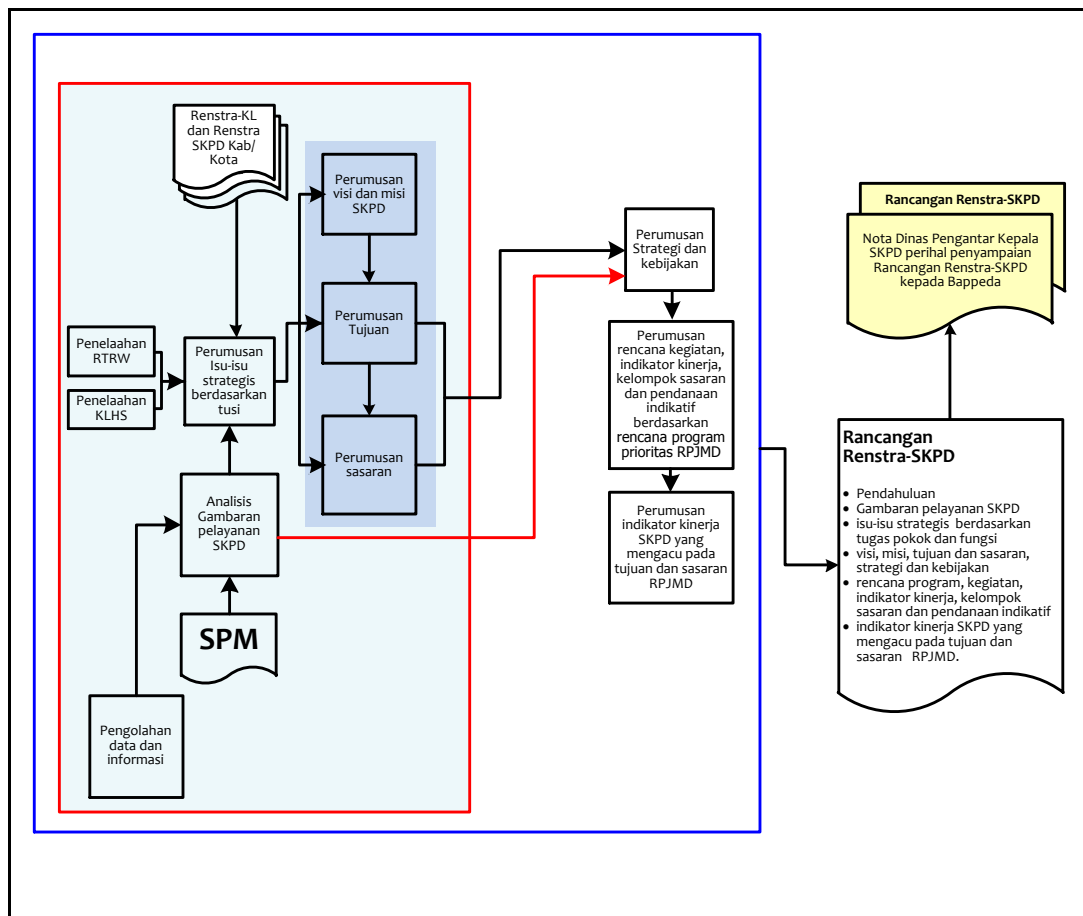


4. Data statistik perhubungan komunikasi dan informatika sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar I.2

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi



## I.2 Landasan Hukum

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
5. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Darat :

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
6. Beberapa aturan tentang angkutan sungai danau dan penyeberangan, antara lain:
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
  - Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 47 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi.
  - Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2004 Tentang Penyempurnaan KE 15 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1989 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2004.
  - Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
  - Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Pengganti Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2004.
7. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Laut :
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

8. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Udara
  - Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional
9. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Kereta Api
  - Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 1995.

### I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah sebagai berikut :

1. Mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Kepala Daerah terpilih periode waktu 2013 – 2018;
2. Memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018;

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan atau transportasi dan urusan komunikasi dan informatika;
2. Sebagai bahan kajian yang akan diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018;

## **I.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **II.1 Penjelasan Umum**

Sistem transportasi yang terintegrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang. Sehingga dengan adanya ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi akan menunjang berbagai kegiatan ekonomi untuk [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Oleh karena itu sistem transportasi harus dikembangkan secara terpadu inter dan intra moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup transportasi darat dan perkeretaapian, sungai, danau dan penyeberangan, laut, dan transportasi udara.

Pertumbuhan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari berbagai event yang diselenggarakan di Sumatera Selatan baik nasional maupun internasional. Semua itu membutuhkan transportasi yang baik. Provinsi Sumatera Selatan memiliki moda transportasi yang lengkap baik transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut serta udara.

Selain mengurus urusan perhubungan atau transportasi, SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, juga mempunyai urusan komunikasi dan informatika. Cakupan wilayah yang cukup luas membutuhkan jaringan komunikasi yang cukup kompleks serta penyebarluasan informasi harus merata sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa. Masih banyak daerah di wilayah Sumatera Selatan yang blank spot akan informasi.

Informasi sebagai gate utama dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, dimana semua daerah harus dapat mengakses informasi seluas-luasnya dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan mampu mempercepat waktu dan pelayanan birokrasi serta transparansi dalam pembangunan. Tantangan informasi dan komunikasi dimasa mendatang adalah mampu mengintegrasikan seluruh aspek pembangunan sehingga dapat berjalan cepat dan hasil yang maksimal.

Profil transportasi serta komunikasi dan informasi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada penjelasan sebagai berikut :

II.1.1 Transportasi Darat

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki panjang jalan nasional 1.290,24 Km atau 8,92%, panjang jalan provinsi 1.621,33 Km atau 11,21%, panjang jalan kabupaten/kota 11.277,88 Km atau 77,97% dan jalan non status 275,10 Km atau 1,90%.

Tabel II.1  
Jaringan Jalan dan Jembatan  
Di Provinsi Sumatera Selatan

NO.	STATUS	PANJANG JALAN (KM)	JEMBATAN	
			JUMLAH (BH)	PANJANG (M)
1.	Nasional*)	1.290,24	271,00	6.323,00
2.	Provinsi	1.621,33	739,00	10.619,00
3.	Kabupaten/Kota**)	11.277,88	1.300,00	19.773,00
4.	Non Status	275,10	-	-
	Jumlah	14.466,55	2.310,00	36.715,00

Sumber : Sesuai SK. Menteri Kimpraswil Th.2004  
Sesuai SK. Gubernur Sumatera Selatan Th.2004

Dari panjang jalan tersebut 92,64% dengan permukaan aspal dan sisanya 7,36% dengan permukaan kerikil. Secara keseluruhan 65,23% jalan berada pada kondisi baik 20,70% kondisi sedang dan 14,07% dalam keadaan rusak.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki fungsi strategis dan sangat vital sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Adapun ketiga ruas jalan utama tersebut adalah :

(a) Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung – Pematang Panggang – Simpang Penyandingan – Kayu Agung – Simpang Indralaya – Palembang – Betung – Batas Jambi sepanjang 405,32 Km dan melewati 5 (lima) kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa-rawa.

(b) Lintas Barat Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura – Baturaja – Simpang Sugiwaras – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Terawas – Batas Jambi sepanjang 472,35 Km dan melewati 6 (enam) kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

(c) Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari 2 (dua) jalan penghubung :

(1) Simpang Indralaya – Prabumulih – Muara Enim

Jalan ini sepanjang 147,46 Km melewati 3 (tiga) kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2) Betung – Sekayu – Muara Beliti

Sepanjang 253,43 Km dan melewati 2 (dua) kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(d) Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar 2 (dua) jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan – Simpang Kepuh – Kurungan Nyawa – Martapura sepanjang 138,74 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(e) Penghubung Alternatif Bagian Tengah

Jalan penghubung alternatif ini dilayani ruas Prabumulih – Simpang Prabumulih – Simpang Beringin – Baturaja sepanjang 106,14 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(f) Penghubung Alternatif Bagian Barat (Tengah Barat)

(1) Ruas Jalan Martapura – Ujan Mas – Batas Bengkulu

Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.

(2) Ruas Jalan Lahat – Pagar Alam – Tanjung Sakti – Batas Bengkulu

Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti – Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5 – 4,5 meter.

(3) Ruas Jalan Pagar Alam – Tanjung Raya – Batas Bengkulu

Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Kondisi angkutan umum yang melintasi Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1892 kendaraan per hari dan 1092 smp/jam. Asal daerah yang paling banyak adalah dari Kota Palembang yaitu sebesar 17,03%, urutan kedua yang terbanyak adalah Kabupaten OKU Selatan 10,92%, Kota Lubuk Linggau berada di urutan ketiga 9,17%. Sedangkan daerah tujuan yang paling banyak Kota Palembang 17,92%, Kabupaten Ogan Ilir 7,04% dan kabupaten/kota lainnya.

Jaringan angkutan barang berupa batubara di wilayah Sumatera Selatan yaitu :

- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim  
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Tanjung Lago (Banyuasin)
- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim  
Muara Enim – PLTU – Tanjung Enim
- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim  
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang
- ❖ Pendopo, Muara Enim  
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Kertapati, Palembang
- ❖ Merapi Timur, Lahat  
Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin
- ❖ Merapi Timur, Lahat  
Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang
- ❖ Merapi Barat, Lahat  
Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin
- ❖ Merapi Barat, Lahat  
Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang



- ❖ Merapi Selatan, Lahat
- Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin

Tabel II.2

Lokasi dan Tipe Terminal di Provinsi Sumatera Selatan

KABUPATEN / KOTA	TIPE A	TIPE B	TIPE C
PALEMBANG			
- Terminal Karya Jaya	v		
- Terminal Alang alang Lebar	v		
- Terminal Jakabaring		v	
- Terminal Tangga Butung			v
- Terminal Lemabang			v
- Terminal Sako			v
BANYUASIN			
- Terminal Betung	v		

KABUPATEN / KOTA	TIPE A	TIPE B	TIPE C
OGAN KOMERING ULU			
- Terminal Baturaja	v		
MUARA ENIM			
- Terminal Muara Enim	v		
- Terminal Simpang Kodim		v	
- Terminal Bantingan		v	
- Terminal Talang Ubi		v	
MUSI RAWAS			
- Terminal Simpang Periuk	v		
- Terminal Lakitan		v	
- Terminal Terawas		v	
PRABUMULIH			
- Terminal Prabumulih		v	

KABUPATEN / KOTA	TIPE A	TIPE B	TIPE C
<b>OGAN ILIR</b>			
- Terminal Ogan Ilir		v	
<b>LAHAT</b>			
- Terminal Batay	v		
- Terminal Muara Siban		v	
- Terminal Lembayung			v
<b>PAGARALAM</b>			
- Terminal Nendagung		v	
- Terminal Gading			v
<b>MUSI BANYUASIN</b>			
- Terminal Randik		v	
- Terminal Sungai Lilin		v	
- Terminal Mangun Jaya		v	

KABUPATEN / KOTA	TIPE A	TIPE B	TIPE C
<b>OKU SELATAN</b>			
- Terminal Muara Dua			v
<b>LUBUK LINGGAU</b>			
- Terminal Simpang Perintis		v	
- Terminal Muara			v
- Terminal Kalimantan			v
- Terminal Watas			v
- Terminal Satelit			v
<b>OGAN KOMERING ILIR</b>			
- Terminal Kayuagung		v	
- Terminal Tanjung Raja		v	
- Terminal Tulung Selapan		v	
<b>OKUTIMUR</b>			
- Terminal Kota Baru		v	
- Terminal Lubuk Harjo		v	

Tabel II.3  
DAFTAR KENDARAAN YANG KELUAR MASUK PPT SE-SUMSEL

NO	PPT	2009			2010			2011			2012			2013		
		M	K	M+K	M	K	M+K	M	K	M+K	M	K	M+K	M	K	M+K
1	SENAWAR JAYA	54.632	92.848	147.480	41.873	64.145	107.018	44.028	78.190	122.218	43.194	66.461	109.655	47.622	57.030	104.652
2	PEMATANG PANGGANG	207.832	107.376	315.208	198.194	107.658	305.852	126.127	75.770	201.897	94.829	48.090	142.919	100.414	52.980	153.394
3	KOTA BARU	34.688	30.577	65.625	22.706	13.101	35.807	32.017	15.598	47.619	49.311	24.975	74.286	48.156	21.370	69.526
4	SIMPANG NIBUNG	11.677	25.340	37.017	12.794	25.624	38.418	15.729	24.595	40.324	17.602	22.700	40.302	19.878	19.410	39.288
5	MERAPI	51.486	34.400	85.886	38.371	25.719	64.090	50.804	34.174	84.978	29.905	19.804	49.709	19.662	12.824	32.486

Tabel II.4  
JUMLAH KECELAKAAN DI WILAYAH SUMATERA SELATAN TAHUN 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kecelakaan	2.218	2.494	3.111	2.806	2.362
Korban (Org)					
Meninggal Dunia	1.051	1.057	1.332	1.232	925
Luka Berat	1.470	1.536	1.676	1.716	1.410
Luka Ringan	1.725	2.146	2.481	2.111	1.863
Kerugian Materil (Rp)	Rp 10.368.660.000	Rp 14.821.845.000	Rp 34.419.933.000	Rp 16.440.370.000	Rp 13.613.450.000

Tabel II.5  
JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN REALISASI APBN DAN APBD

No.	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Rambu-Rambu		20	385	1.100	210	498
	- APBD	Buah	20	335	900	-	340
	- APBN	Buah	-	50	200	210	158
2	RPPJ		6	20	116	0	8
	- APBD	Buah	6	-	60	-	8
	- APBN	Buah	-	20	56	-	-
3	Marka Jalan		51.224	36.032	24.400	44.211	103.200
	- APBD	M'	1.224	1.032	4.400	-	90.500
	- APBN	M'	50.000	35.000	20.000	44.211	12.700
4	Warning Light		0	0	12	2	2
	- APBD	Buah	-	-	12	-	-
	- APBN	Buah	-	-	-	2	2
5	Traffic Light		2	2	5	1	0
	- APBD	Buah	2	-	3	-	-
	- APBN	Buah	-	2	2	1	-
6	Pagar Pengaman		3.280	1.380	3.000	2.122	1.652
	- APBD	M'	280	280	1.000	1.876	1.012
	- APBN	M'	3.000	1.100	2.000	246	640
7	Cermin Tikungan		0	0	0	5	0
	- APBD	Buah	-	-	-	5	-
	- APBN	Buah	-	-	-	-	-
8	Deliniator		0	250	225	130	0
	- APBD	Buah	-	-	225	-	-
	- APBN	Buah	-	250	-	130	-
9	Paku Jalan		0	0	1.819	1.676	4.173
	- APBD	Buah	-	-	-	1.000	-
	- APBN	Buah	-	-	1.819	676	4.173
10	LPJU		0	0	0	34	0
	- APBD	Buah	-	-	-	-	-
	- APBN	Buah	-	-	-	34	-

Tabel II.6  
JUMLAH PERUSAHAAN BUS ANTAR PROVINSI DAN JUMLAH BUS ANTAR PROVINSI  
DI SUMATERA SELATAN

Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Perusahaan Bus	Perusahaan	32	31	31	31	10
Bus	Unit	519	559	574	584	196

**Tabel II.7**  
**JUMLAH PERUSAHAAN BUS PARIWISATA DAN JUMLAH BUS PARIWISATA DI SUMATERA SELATAN**

Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Perusahaan Bus	Perusahaan	7	8	10	10	8
Bus	Unit	43	52	69	66	59

**Tabel II.8**  
**JUMLAH ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANTAR PROVINSI (AJAP)**  
**DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Palembang	Unit	18	18	18	18	18
	PO. Batang Hari Wisata	Unit	18	18	18	18	18
2	Prabumulih	Unit	-	-	-	-	-
3	Pagar Alam	Unit	-	-	-	-	-
4	Lubuk Linggau	Unit	-	-	-	-	-
5	Banyu Asin	Unit	-	-	-	-	-
6	Musi Banyu Asin	Unit	-	-	-	-	-
7	Ogan Ilir	Unit	-	-	-	-	-
8	Ogan Komering Ilir	Unit	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu	Unit	-	-	-	-	-
10	OKU Timur	Unit	-	-	-	-	-
11	OKU Selatan	Unit	-	-	-	-	-
12	Muara Enim	Unit	-	5	5	5	5
	PO. Kartika Mandiri	Unit	-	5	5	5	5
13	Musi Rawas	Unit	-	-	-	-	-
14	Lahat	Unit	-	-	-	-	-
15	Empat Lawang	Unit	-	-	-	-	-
16	PALI	Unit	-	-	-	-	-
17	Muratara	Unit	-	-	-	-	-
Jumlah			18	23	23	23	23

**Tabel II.9**  
**JUMLAH ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)**  
**DI SUMATERA SELATAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Palembang	Unit	-	-	-	4	4
	PO. Tanjung Wisata	Unit	-	-	-	4	4
2	Prabumulih	Unit	-	-	-	-	-
3	Pagar Alam	Unit	-	-	-	-	-
4	Lubuk Linggau	Unit	-	-	-	-	-
5	Banyu Asin	Unit	-	-	-	-	-
6	Musi Banyu Asin	Unit	-	-	-	-	-
7	Ogan Ilir	Unit	-	-	-	-	-
8	Ogan Komering Ilir	Unit	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu	Unit	15	15	15	20	15
	1. PO. Batang Hari Wisata	Unit	5	5	5	5	-
	2. PO. Batu Raja Indah Wisata 99	Unit	10	10	10	15	15

10	OKU Timur	Unit	-	-	-	-	-
11	OKU Selatan	Unit	-	-	-	-	-
12	Muara Enim	Unit	-	-	-	-	-
	PO. Kartika Mandiri	Unit	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas	Unit	-	-	-	-	-
14	Lahat	Unit	-	-	-	-	-
15	Empat Lawang	Unit	-	-	-	-	-
16	PALI	Unit					
17	Muratara	Unit					
Jumlah			15	15	15	24	19

**Tabel II.10**  
**JUMLAH UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	KABUPATEN/KOTA	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Palembang	Unit	1	1	1	1	1
2	Prabumulih	Unit	1	1	1	1	1
3	Pagar Alam	Unit	1	1	1	1	1
4	Lubuk Linggau	Unit	1	1	1	1	1
5	Banyuasin	Unit	1	1	1	1	1
6	Musi Banyuasin	Unit	1	1	1	1	1
7	Ogan Ilir	Unit	1	1	1	1	1
8	Ogan Komering Ilir	Unit	1	1	1	1	1
9	Ogan Komering Ulu	Unit	1	1	1	1	1
10	OKU Timur	Unit	1	1	1	1	1
11	OKU Selatan	Unit	1	1	1	1	1
12	Muara Enim	Unit	1	1	1	1	1
13	Musi rawas	Unit	1	1	1	1	1
14	Lahat	Unit	1	1	1	1	1
15	Empat Lawang	Unit	-	-	-	-	-
16	PALI	Unit	-	-	-	-	-
17	Muratara	Unit	-	-	-	-	-
JUMLAH			14	14	14	14	14

**Tabel II.11**  
**DAFTAR JUMLAH ANGKUTAN KOTA / DESA DI SUMATERA SELATAN**

NO	KOTA / KABUPATEN	2009		2010		2011		2012		2013	
		Jenis		Jenis		Jenis		Jenis		Jenis	
		MPU	BUS	MPU	BUS	MPU	BUS	MPU	BUS	MPU	BUS
1	Palembang					1.520	237	1.520	237	1.520	237
2	Prabumulih					326	-	326	-	326	-
3	Pagar Alam					1.605	-	1.605	-	1.605	-
4	Lubuk Linggau					372	-	372	-	372	-
5	Banyuasin					162	-	162	-	162	-
6	Musi Banyuasin					95	-	95	-	95	-
7	Ogan Ilir					126	-	126	-	126	-
8	Ogan Komering Ilir					115	-	115	-	115	-

9	Ogan Komerling Ulu					600	-	600	-	600	-
10	OKU Timur					19	-	19	-	19	-
11	OKU Selatan					236	-	286	-	286	-
12	Muara Enim					443	-	443	-	443	-
13	Musi rawas					220	-	220	-	220	-
14	Lahat					650	-	650	-	650	-
15	Empat Lawang					350	-	350	-	350	-
16	PALI					-	-	-	-	-	-
17	Muratara					-	-	-	-	-	-
JUMLAH						6.839	237	6.889	237	6.889	237

II.1.2   Transportasi Perkeretaapian

Bahwa dalam satu hari pelayanan terdapat 8 (delapan) kereta api dengan berbagai kelas yang beroperasi di Stasiun Kertapati. Dari Stasiun Kertapati terdapat 2 (dua) buah kereta api tujuan Lubuk Linggau yaitu Kereta Api Sindang Marga I dan Kereta Api Serelo I. Kereta Api yang berasal dari Stasiun Kertapati tujuan Tanjung Karang memiliki 2 (dua) buah kereta api yaitu Kereta Api Sriwijaya I dan Kereta Api Raja Basa I.

Dari Stasiun Lubuk Linggau terdapat 2 (dua) buah kereta api tujuan Stasiun Kertapati yaitu Kereta Api Sindang Marga II dan Kereta Api Serelo II. Sedangkan dari Tanjung Karang terdapat 2 (dua) buah kereta api yang tujuan ke Stasiun Kertapati yaitu Kereta Api Sriwijaya II dan Kereta Api Raja Basa II.

Jumlah penumpang kereta api dalam satu hari adalah 3082 penumpang. Perjalanan penumpang kereta api di wilayah Sumatera Selatan terbanyak berasal dari Stasiun Kertapati yaitu sebanyak 1594 penumpang (51,72%). 952 penumpang (30,89%) berasal dari Stasiun Tanjung Karang dan 536 penumpang (17,39%) berasal dari Stasiun Lubuk Linggau. Untuk tujuan penumpang terbanyak adalah Stasiun Kertapati yaitu sebanyak 1488 penumpang (48,28%). 721 penumpang (23,29%) dengan tujuan Lubuk Linggau dan 873 penumpang (28,32%) dengan tujuan Stasiun Tanjung Karang.

Kereta Api dari Stasiun Kertapati ke Stasiun Lubuk Linggau tidak terisi penuh. Untuk Kereta Api Sindang Marga I (kelas eksekutif dan bisnis) hanya 65,7% saja yang terisi oleh penumpang, sebagiannya lagi tidak ada penumpang. Sedangkan untuk Kereta Api Serelo I (kelas ekonomi) hnaya 81,56% yang terisi, begitu juga untuk Kereta Api dari Stasiun Lubuk Linggau ke Stasiun Kertapati. Kereta Api Sindang Marga II yang melayani kelas eksekutif dan bisnis terisi penumpang sebesar 75,4%. Kereta Api Serelo II yang melayani kelas ekonomi hanya terisi sebagiannya saja

(48,76%). Ini mungkin disebabkan dengan waktu keberangkatan yang tidak sesuai dengan keinginan penumpang dan kebanyakan penumpang lebih memilih moda lain (travel) dibandingkan Kereta Api.

Kereta Api yang berasal dari Stasiun Kertapati dengan tujuan Stasiun Tanjung Karang juga tidak berbeda jauh dengan kereta yang lainnya. 73,2% Kereta Api Sriwijaya I (kelas eksekutif dan bisnis) yang terisi oleh penumpang. Sedangkan untuk kereta api kelas ekonomi yaitu Kereta Api Raja Basa I lebih penuh yaitu sebesar 92,1% yang terisi penumpang. Sebaliknya untuk Kereta Api yang berasal dari Stasiun Tanjung Karang tujuan Stasiun Kertapati hampir terisi penuh malah sampai melebihi kapasitas tempat duduk yang ada. Untuk Kereta Api Sriwijaya II (kelas eksekutif dan bisnis) 94,7% terisi penumpang. Sedangkan untuk Kereta Api Raja Basa II (kelas ekonomi) melebihi kapasitas yang ada yaitu sebesar 103,04%. Hal ini terlihat bahwa banyaknya aktivitas yang dilakukan di wilayah Palembang sehingga penumpang untuk tujuan ke Palembang lebih banyak dibandingkan tujuan ke Tanjung Karang.

Angkutan Kereta Api barang dari Lubuk Linggau sudah tutup, yang ada hanya kereta api angkutan BBM. Angkutan yang masih primadona kereta api masih batubara (kereta api babaranjang). Dalam satu hari terdapat 10 kereta api barang dengan berbagai jenis komoditi yang dibawanya beroperasi. Kereta Api barang yang berasal dari Tanjung Enim sebanyak 7 buah kereta, dengan jenis komoditi yang diangkut adalah batubara. Kereta Api yang mengangkut batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan (Lampung Selatan) adalah Kereta Api B.12, B.13, B.15, B.17, B.19 dan B.21. Sedangkan Kereta Api K.12 adalah kereta api barang batubara dengan tujuan ke Stasiun Kertapati Palembang.

Berat total batubara yang diangkut dari Tanjung Enim ke Tarahan (Lampung Selatan) per harinya adalah 12.700 ton dengan 6 buah kereta api barang. Sedangkan berat yang diangkut dari Tanjung Enim ke Stasiun Kertapati Palembang adalah 1050 ton. Selain batubara, kereta api barang juga mengangkut jenis komoditi yang lain yaitu BBM dan Pulp. Kereta Api angkutan barang yang membawa jenis komoditi BBM yaitu Kereta Api 2725 dan Kereta Api 2723. Kereta Api 2725 membawa BBM dari Stasiun Kertapati Palembang menuju Stasiun Baturaja OKU dengan berat total 434,2 ton. Kereta Api 2723 membawa BBM dari Stasiun Kertapati Palembang menuju Stasiun Baturaja OKU dengan berat total 573,5 ton. Satu kereta api barang yaitu Kereta Api 2727 membawa jenis komoditi pulp dengan berat 700 ton yang berasal dari Stasiun Niruh Prabumulih menuju Stasiun Tarahan Lampung Selatan.

Tabel II.12  
JUMLAH ANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG KERETA API

No	URAIAN	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	BARANG (TON)	11.861.228	12.369.483	12.972.170	14.173.423	15.859.859
2	PENUMPANG ( ORANG )	1.744.238	1.939.978	2.010.984	1.425.500	1.350.846

II.1.3 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Salah satu dari sembilan sungai terbesar yang ada di Sumatera Selatan adalah Sungai Musi. Sungai Musi berada di tengah-tengah Kota Palembang, sungai tersebut banyak dimanfaatkan untukm pengangkutan atau transportasi. Selain mengangkut orang, angkutan sungai digunakan untuk membawa hasil bumi, terutama kelapa sawit dan CPO yang banyak terdapat disekitar aliran sungai.

Angkutan sungai di dalam Kota Palembang diwarnai dengan keberadaan kapal-kapal barang dan penumpang yang melakukan aktivitas disepanjang Sungai Musi. Mobilitas penumpang dimungkinkan karena tidak ada jalan penghubung selain jembatan Ampera yang menjembatani daerah Seberang Ulu dan daerah Ilir, karena jembatan Musi II berada jauh di luar kawasan kota atau pada jalan lingkar barat sekitar 10 Km dari pusat kota.

Tabel II.13  
Kondisi Eksisting Angkutan Sungai Dari Kota Palembang

NO.	TRAYEK	PELAYANAN	KONDISI EKSISTING
1.	Palembang – Pangkalan Bulian	Sungai Pinang – Muara Lematang – Teluk Kijing – Teluk Teladan – Pangkalan Bulian	Trayek untuk penumpang ke arah hulu sampai dengan Pangkalan Bulian sudah jarang, tetapi untuk angkutan barang masih bisa dikembangkan
2.	Palembang – Muara Karang	Pemulutan – Tanjung Raja – Muara Kuang	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang, namun terjadi pendangkalan di beberapa lokasi
3.	Palembang – Muara Rupit	Sungai Pinang – Muara Lematang – Sekayu – Babat – Muara Rawas – Pauh – Bingin Teluk – Muara Rupit	Trayek ini masih ada untuk angkutan orang dan barang
4.	Palembang – Tanjung Raja	Pemulutan – Tanjung Raja	Trayek ini masih ada untuk angkutan orang dan barang



5.	Palembang – Sungai Lumpur	Pemulutan – Tulung Selapan – Sungai Lumpur	Trayek Palembang – Tulung Selapan sudah tidak ada. Sedangkan untuk Tulung Selapan – Sungai Lumpur masih ada dengan penumpang yang sudah mulai berkurang
6.	Palembang – Tulung Selapan	Muara Batun – Sp. Padang – Pampangan – Tulung Selapan	Trayek ini sudah tidak ada
7.	Palembang – Muara Kelingi	Sungai Pinang – Muara Lematang – Sekayu – Babat – Muara Lakitan – Muara Kelingi	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang dan pada musim kemarau debit air kecil di daerah hulu sehingga menyulitkan perjalanan
8.	Palembang – Muara Enim	Sungai Pinang – Muara Lematang – Muara Enim	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
9.	Palembang – Muara Sugihan	Muara Padang – Air Sugihan – Muara Sugihan	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
10.	Palembang – Sungsang	Makarti Jaya – Sungsang	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
11.	Palembang – Telang	Simpang PU – Telang	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
12.	Palembang – Bayung Lencir	Simpang PU – Telang – Bayung Lencir	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
13.	Palembang – Sungai Lilin	Simpang PU – Penuguan – Pulau Rimau – Sungai Lilin	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
14.	Palembang – Karangagung	Simpang PU – Karangagung	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang

Satu-satunya angkutan danau di Provinsi Sumatera Selatan yang masih eksis adalah angkutan Danau Ranau, di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan, yang melayani trayek Ranau (Sumatera Selatan) ke Kota Batu (Lampung Selatan). Angkutan danau di Danau Ranau mendukung kegiatan kepariwisataan di Kabupaten OKU Selatan, dan masuk dalam kajian MP3EI sebagai kawasan strategis terpadu pariwisata Danau Ranau.

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api menjadi satu-satunya Pelabuhan Penyeberangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang menghubungkan ke Provinsi Bangka Belitung, sedangkan Pelabuhan 35 Ilir akan beralih operasionalnya ke Tanjung Api-api yang akan diresmikan pada tanggal 11 Desember 2013. Waktu tempuh dari Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api lebih singkat sekitar 2,5 – 3 jam menuju Pelabuhan Tanjung Kalian di Provinsi Bangka Belitung, sedangkan dari Pelabuhan 35 Ilir akan memakan waktu sekitar 8 jam.

Dengan dibukanya Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api akan membuka kawasan Tanjung Api-api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api yang peraturannya sebentar lagi akan ditetapkan. Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api telah masuk dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sumatera.

Tabel II.14  
INTENSITAS ANGKUTAN KENDARAAN BERDASARKAN GOLONGAN  
PELABUHAN PENYEBERANGAN 35 ILIR PALEMBANG

NAMA PELABUHAN : 35 Ilir						
NO.	Uraian	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Gol II (Sepeda Motor)					
	-Tiba	3.607	5.701	8.579	34.977	-
	-Berangkat	4.452	6.237	8.930	11.701	-
2	Gol IV (M.bus, Jeep dan sejenisnya)					
	-Tiba	2.796	3.318	4.781	4.674	-
	-Berangkat	3.203	4.295	5.948	6.066	-
3	Gol V ( truck, bus dan sejenisnya )					
	-Tiba	7.257	8.344	8.583	8.011	-
	-Berangkat	7.862	9.573	9.752	9.899	-
4	Gol VI(truck Fuso)					
	-Tiba	139	237	408	260	-
	-Berangkat	253	450	583	619	-
5	Gol VII (truck tronton)					
	-Tiba					-
	-Berangkat					-

Tabel II.15  
PRODUKTIVITAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN  
PELABUHAN PENYEBERANGAN 35 ILIR PALEMBANG

NAMA PELABUHAN/DERMAGA : 35 Ilir						
No	URAIAN	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	JUMLAH TRIP					
	TIBA	757	1.006	1.109	1.083	-
	BERANGKAT	766	1.043	1.111	1.199	-
2	JUMLAH PENUMPANG					
	TIBA	22.275	21.924	31.676	26.954	-
	BERANGKAT	54.305	63.452	70.346	54.271	-
3	JUMLAH KENDARAAN					
	TIBA	-	-	-	-	-
	BERANGKAT	13.799	17.600	22.351	47.922	-

Tabel II.16  
Rencana Kapal Yang Beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api

NO.	NAMA KAPAL	PEMILIK	GROSS TONAGE (GT)	KAPASITAS SEAT	KAPASITAS KENDARAAN (R-4)	KAPASITAS KENDARAAN (R-2)
1.	KMP.KERAPU	PT.ASDP	288	170	18	20
2.	KMP.KUALA BATEE	PT.ASDP	250	120	18	20
3.	KMP.SRIKANDI	PT.JEMBATAN NUSANTARA	476	128	20	20
4.	KMP.MULIA NUSANTARA	PT.JEMBATAN NUSANTARA	681	240	18	20
5.	KMP.PERMATA LESTARI	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN	360	60	25	20
6.	KMP.KAYUNG UTARA	PT.ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN	148	75	10	20
7.	KMP.ADHI SWARNA DHARMA III	PT.PRIMA EKSEKUTIF	511	200	36	20
8.	KMP.SATYA KENCANA II	PT.DHARMA LAUTAN UTAMA	2.115	400	40	40

II.1.4 Transportasi Laut

Saat ini aktivitas transportasi laut masih mengandalkan Pelabuhan Boom Baru Palembang sebagai Pelabuhan Utama di Provinsi Sumatera Selatan. Pelabuhan Boom Baru melayani trayek angkutan laut berupa barang dan angkutan penumpang melalui kapal cepat. Asal perjalanan kapal laut sebesar 26,7% berasal dari Palembang itu sendiri, sedangkan 16,7% kapal yang ada di Pelabuhan berasal dari Riau dan Batam, 33,4% berasal dari pulau Jawa yaitu Jakarta dan Jawa Tengah. Untuk kapal yang berasal dari negara Singapura sebesar 10% dan 9% dari negara Malaysia dan Bangkok (Thailand) serta 3% berasal dari Pulau Kalimantan.

Tabel II.17  
ARUS KUNJUNGAN KAPAL PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG 2009 S/D 2013

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pelayaran Luar Negeri	Unit	688	681	692	820	835
		GRT	2.055.709	2.036.985	2.200.486	2.782.352	5.684.437
2.	Pelayaran Dalam Negeri	Unit	1.846	1.405	2.140	2.790	3.019
		GRT	3.521.352	2.724.727	4.675.373	5.280.468	2.521.543
JUMLAH		Unit	2.534	2.086	2.832	3.610	3.854
		GRT	5.577.061	4.761.712	6.875.859	8.062.820	8.205.980

**Tabel II.18**  
**KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DAN PENUMPANG**  
**DIPELABUHAN PALEMBANG TAHUN 2009 S/D TAHUN 2013**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
I	PERDAGANGAN LUAR NEGERI						
1	BONGKAR	Ton	373.612	508.917	615.343	746.295	1.456.178
2	MUAT	Ton	1.519.231	1.618.591	1.507.455	1.818.248	2.308.784
*	<b>SUB JUMLAH I</b>	<b>Ton</b>	<b>1.892.843</b>	<b>2.127.508</b>	<b>2.122.798</b>	<b>2.564.543</b>	<b>3.764.962</b>
II	PERDAGANGAN DALAM NEGERI						
1	BONGKAR	Ton	1.119.050	1.083.594	1.779.173	1.481.815	1.598.208
2	MUAT	Ton	2.882.060	3.552.502	3.968.691	3.629.266	3.358.277
**	<b>SUB JUMLAH II</b>	<b>Ton</b>	<b>4.001.110</b>	<b>4.636.096</b>	<b>5.747.864</b>	<b>5.111.081</b>	<b>4.956.485</b>
***	<b>JUMLAH I + II</b>	<b>Ton</b>	<b>5.893.953</b>	<b>6.763.604</b>	<b>7.870.662</b>	<b>7.675.624</b>	<b>8.721.447</b>
III	PENUMPANG						
1	DATANG	Orang	151.965	168.681	204.501	177.038	162.367
2	BERANGKAT	Orang	155.910	170.983	183.280	151.844	151.160
*	<b>JUMLAH III</b>	<b>Orang</b>	<b>307.875</b>	<b>339.664</b>	<b>387.781</b>	<b>328.882</b>	<b>313.527</b>

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Pelabuhan Palembang adalah lebar alur pelayaran, kedalaman efektif dan waktu pelayaran yang sangat tergantung pada pasang surut sungai. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis sebagai pelabuhan di tepi sungai. Alur pelayaran Pelabuhan Palembang sejak dari laut dalam sampai dengan dermaga umum Boom Baru menyusuri Sungai Musi adalah sepanjang 108 km dengan lebar efektif alur bervariasi antara 100 – 300 meter.

Dengan kondisi tersebut, maka alur pelayaran Pelabuhan Palembang praktis hanya dapat dikunjungi oleh kapal berukuran maksimal 5.000 DWT pada kondisi full loaded draft, itupun dengan memanfaatkan pasang tinggi Sungai Musi. Dengan lebar alur efektif yang paling sempit adalah 100 meter, maka alur pelayaran Pelabuhan Palembang untuk kapal besar hanya dapat berfungsi sebagai satu jalur, namun kapal dapat berpapasan pada lokasi-lokasi dimana lebar alur lebih dari 200 meter.

Menyadari kondisi alur pelayaran yang terbatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan berkomitmen membangun Pelabuhan Laut Tanjung Api-api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api.

II.1.5 Transportasi Udara

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bandar udara internasional yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk moda yang digunakan dari tempat asal ke bandara bervariasi. 33,33 orang menuju bandara menggunakan mobil pribadi, disusul dengan kendaraan kantor dan sewa mobil sebesar 26,67%. Sedangkan orang yang menggunakan sepeda

motor sebesar 23,33% yang menggunakan bus sebesar 10% dan taksi sebesar 6,67%.

Tabel II.19  
Tipe dan Lokasi Bandara di Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA BANDARA	TIPE	LOKASI	KETERANGAN
I.	SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II	Internasional	Kota Palembang	
2.	SKYLINE	Domestik	Kab.Musi Banyuasin	
3.	SILAMPARI	Domestik	Kab.Musi Rawas	
4.	ATUNG BUNGSU	Domestik	Kota Pagar Alam	
5.	LAPANGAN TERBANG PERINTIS	Domestik	Kab.Lahat	Tahap Pembangunan

Tabel II.20  
LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG  
DI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG

DATANG/ BERANGKAT	TRAYEK ANGKUTAN	KONDISI YANG ADA	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
BERANGKAT	Domestik	Pesawat	7.146	8.014	10.521	11.098	10.825
		Penumpang	862.009	1.042.727	1.258.509	1.402.971	1.286.949
	Internasional	Pesawat	544	245	383	634	549
		Penumpang	46.405	19.473	28.500	54.905	57.779
DATANG	Domestik	Pesawat	7.146	8.014	10.521	11.098	10.822
		Penumpang	854.846	1.027.033	1.285.617	1.371.719	1.280.126
	Internasional	Pesawat	544	245	383	634	549
		Penumpang	47.310	19.180	29.960	56.143	109.650
TOTAL		Pesawat	15.380	16.518	21.608	23.464	22.745
		Penumpang	1.810.570	2.108.413	2.602.586	28.225.738	2.734.504

Tabel II.21  
LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG  
DI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG

BONGKAR / MUAT	TRAYEK ANGKUTAN	KONDISI YANG ADA	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
			Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
1	2	3	4	5	6	7	8
BONGKAR	Domestik	Bagasi	7.325.926	8.430.299	9.655.738	10.201.939	601.267
		Kargo	6.112.765	7.525.909	9.035.802	9.766.193	328.244
		Pos	365.743	452.362	447.971	325.282	105.261
	Internasional	Bagasi	580.767	271.507	432.880	547.644	601.267
		Kargo	87.151	17.985	123.843	353.675	328.244
		Pos	116	-	-	-	105.261
MUAT	Domestik	Bagasi	7.537.178	8.746.185	9.696.842	10.577.880	444.692
		Kargo	1.869.083	2.180.210	2.723.240	3.365.761	62.560
		Pos	620.792	199.603	210.891	172.381	47.053
	Internasional	Bagasi	421.726	218.697	335.488	396.504	444.692

	Kargo	71.403	75.249	82.567	68.599	62.560
	Pos	1.711	-	-	-	4.705.053
	Bagasi	15.865.597	17.666.688	20.130.948	21.723.967	2.091.918
	Kargo	8.160.402	9.799.353	11.965.452	13.554.228	781.608
	Pos	988.362	651.965	658.862	497.663	3.044.628

## II.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Provinsi Sumatera Selatan;
- Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan sungai, danau, penyeberangan dan perhubungan laut;
- Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;
- Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi standarisasi teknis di bidang Pos, Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Multimedia;
- Pelaksanaan kerjasama teknologi Informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta informasi sistem Komunikasi dan Informatika;
- Pemeliharaan sistem Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Pengkoordinasian dengan Dinas/Lembaga/Unit Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi dalam rangka Collecting, entry dan akurasi data;

- j. Pengumpulan dan verifikasi Informasi Publik meliputi Politik, Hukum, Keamanan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pengelolaan Pendapat Umum;
- k. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- l. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelesaikan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan dan administrasi perjalanan Dinas;
  - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas dan fasilitasi informasi lingkungan;
  - c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  - d. Pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. Persiapan bahan penyusunan rancangan peraturan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (3) Rincian tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian :
  - a. Melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
  - b. Mengurus rumah tangga dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
  - c. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  - d. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  - e. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
  - f. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat.
  - g. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan dilingkungan Dinas;
  - h. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;



- i. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- l. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin / Tugas Belajar;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dilingkungan Dinas, dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

b. Subbagian Keuangan

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan SKPD dan administrasi keuangan
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - b. Perasiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja SKPD;
  - c. Pelaksanaan penatalaksanaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan.
- (3) Rincian tugas sub bagian keuangan :
  - a. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
  - b. Melaksanakan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
  - c. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;

- d. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
- e. Menyiapkan dan penyusunan laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
- f. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin serta Pembangunan;
- g. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
- i. Melaksanakan pembendaharaan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan / Penerimaan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

c. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan

- (1) Sub bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Sumatera Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Subbag Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pengembangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - b. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Rincian tugas sub bagian perencanaan dan pengembangan :

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Mengkoordinasikan usulan program tahunan perhubungan, komunikasi dan informatika dengan instansi lain;
- c. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satker Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan, Komunikasi dan informatika di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat.
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika jangka menengah dan panjang;
- f. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. Membuat dokumen-dokumen bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berupa kinerja sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika, tatanan transportasi wilayah, RENSTRA dan dokumen lainnya;
- h. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika;
- i. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- k. Menyusun program laporan dinas baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan laporan Dinas lainnya;

- I. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

### **3. Bidang LLAJ dan Perkeretaapian**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang perkeretaapian, bidang pengendalian dan operasional LLAJ.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kereta Api mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang LLAJ dan Perkeretaapian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Seksi Perkeretaapian;
- c. Seksi Pengendalian Operasional LLAJ.

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Rincian tugas seksi lalu lintas dan angkutan jalan :

- a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan nasional;
- b. penyusunan dan penetapan rencana umum Jaringan Transportasi Jalan Provinsi;
- c. memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
- d. melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum dan barang;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum;
- f. memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi dan izin angkutan khusus;
- g. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
- j. melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri dan pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor dan surat keterangan bebas uji berkala untuk pertama kali;
- k. memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan peruntukannya;
- l. pemberian rekomendasi penetapan lokasi terminal penumpang tipe B;
- m. memberikan rekomendasi perusahaan karoseri/bengkel konstruksi kendaraan bermotor dengan tidak merubah tipe, memberikan pelayanan/pengesahan modifikasi kendaraan

bermotor dengan tidak merubah tipe, rekomendasi teknis terhadap kendaraan bermotor milik pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta;

- n. menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDP dan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan lintas;
- o. membuat usulan penentuan lokasi jembatan timbang dan penetapan lokasi rest area di jalan provinsi dan jalan nasional;
- p. melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang akan diusulkan untuk dihapuskan oleh instansi yang bersangkutan;
- q. membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP, izin angkutan barang berbahaya dan surat keterangan jalan;
- r. pemberian rekomendasi pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;
- s. pemberian rekomendasi persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;
- t. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- u. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- v. pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
- w. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;
- x. pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- y. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- z. pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- aa. pemberian izin operasi angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
- bb. pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
- cc. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi;

- dd. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
- ee. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;
- ff. penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas di jalan provinsi.

b. Seksi Perkeretaapian

(1) Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang perkeretaapian.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi perkeretaapian mempunyai tugas :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian;

(3) Rincian tugas seksi perkeretaapian :

- a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan rencana dan program angkutan kereta api;
- b. penetapan rencana untuk perkeretaapian provinsi;
- c. melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait, serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- d. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api;
- e. melakukan pengendalian operasional stasiun kereta api Indralaya;
- f. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten kota;

- g. pemberian arahan, bimbingan pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi;
- i. pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- j. penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- k. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi;
- l. penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
- m. penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- n. penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- o. penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- p. izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- q. penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.



c. Seksi Pengendalian Operasional LLAJ

- (1) Seksi Pengendalian Operasional LLAJ mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi perkeretaapian mempunyai tugas :
  - a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ;
  - b. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ;
  - c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasional LLAJ.
- (3) Rincian tugas seksi pengendalian operasional LLAJ:
  - a. menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program pengendalian operasional LLAJ;
  - b. menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional LLAJ;
  - c. mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional serta pengendalian operasional jembatan timbang di Pos Pengawasan Terpadu (PPT);
  - d. melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi;
  - e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi;
  - f. melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek);
  - g. meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan provinsi dan nasional;
  - h. melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi;
  - i. memberikan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan nasional dan provinsi di jalan;

- j. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan;
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
- l. melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- m. pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan (portable);
- n. perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
- o. pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
  - Perda provinsi bidang LLAJ;
  - Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
  - Perizinan angkutan umum.
- p. pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
- q. melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutan/rangkaian VVIP.

#### **4. Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan**

Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman , kriteria dan prosedur, di bidang Jaringan Transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan Transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan,

- pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;

Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan membawahi 3 (tiga) seksi :

- a. Seksi Jaringan dan Keselamatan
  - b. Seksi Dampak Lalu Lintas
  - c. Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan
- a. Seksi Jaringan dan Keselamatan
- (1) Seksi Jaringan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi jaringan dan keselamatan mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;
    - b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;
    - c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;
  - (3) Rincian tugas seksi jaringan dan keselamatan:
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;
    - b. Pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;
    - c. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan;

- d. Penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi kota/kabupaten;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten;
  - f. Pemberian bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
  - g. Pemberian pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten / Kota;
  - h. Pemberian pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten / Kota;
  - i. Pemberian pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan Kabupaten / Kota.
- b. Seksi Dampak Lalu Lintas
- (1) Seksi Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang dampak lalu lintas perkotaan.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi dampak lalu lintas mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;
    - b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;
    - c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang dampak lalu lintas transportasi perkotaan;
  - (3) Rincian tugas seksi dampak lalu lintas :
    - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
    - b. Pemberian bimbingan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;

- c. Penyusunan master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
  - d. Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.
- c. Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan
- (1) Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda transportasi perkotaan;
    - b. Penyusunan standar, norma, pedoman , kriteria dan prosedur, di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda transportasi perkotaan;
    - c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan dan pemanduan moda transportasi perkotaan;
    - d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
    - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;
  - (3) Rincian tugas seksi manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan adalah sebagai berikut :
    - a. Pemberian bimbingan manajemen perusahaan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam hal sistem penggajian perawatan kesehatan dan jaminan hari tua pengemudi angkutan kota dan pedesaan;
    - b. Pemberian bimbingan tentang jenis dan bentuk sarana angkutan perkotaan yang efisien dan efektif serta ramah lingkungan;
    - c. Penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;

- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- e. Penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten;
- f. Penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kota / Kabupaten.

## **5. Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.**

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) dan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta di bidang Angkutan Laut.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) dan Laut mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut;
- b. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut, Sarana dan Prasarana ASDP dan Perhubungan Laut;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut
- c. Seksi Sarana dan Prasarana

a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

(1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP) mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan;
- b. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (LLASDP):

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- b. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
- c. Menyiapkan pelayanan pemberian persetujuan operasional angkutan barang khusus dan barang berbahaya, izin pengangkutan/penarikan kayu (log) untuk angkutan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan Lalu Lintas Kabupaten/Kota serta persetujuan angkutan perairan pedalaman;
- d. Penetapan tarif angkutan Sungai dan Danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam Provinsi dan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
- e. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi
- f. Penerbitan pas perairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
- g. Penerbitan dokumen pengawakan kapal
- h. Melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Pendaftaran bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor > GT 7

- i. Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional ASDP lintas kabupaten/Kota;
- j. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Laut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor dibidang Lalu Lintas Angkutan Laut;
  - b. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Laut;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas seksi Lalu Lintas Angkutan Laut :
  - a. Izin Usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.;
  - b. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional. (lintas batas);
  - c. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - d. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi , lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas)
  - e. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota.dalam satu provinsi;



- f. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional;
- g. Menyiapkan pelayanan pemberian izin usaha bongkar muat usaha jasa pengurusan transportasi, izin usaha jasa ekspedisi muatan muatan kapal laut , izin usaha angkutan perairan pedalaman, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha tally, izin usaha depo peti kemas dan ,izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
- h. Memberikan persetujuan kegiatan Ship to Ship (STS) antar Kabupaten/Kota serta wilayah Provinsi;
- i. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional lalu lintas dan angkutan laut;
- j. Memberikan pelayanan izin kegiatan penyelaman/pekerjaan bawah air di perairan laut 4 sampai dengan 12 mil.

c. Seksi Sarana dan Prasarana

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor di bidang sarana dan prasarana;
  - b. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas seksi sarana dan prasarana :
  - a. Menghimpun dan mengelola data kapal – kapal pedalaman dan kapal laut berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta laut.

- b. Menetapkan titik lokasi pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu – rambu ASDP pada lintas Kabupaten/Kota)
- c. Pemberian izin pemasangan alat penangkapan ikan, pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pel;ayaran lintas kabupaten /kota;
- d. Pemberian izin perbengkelan dan galangan kapal atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
- e. Pemberian izin lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional
- f. Pemberian izin penyediaan jasa pengerukan dan reklamasi di pelabuhan regional;
- g. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/ DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar Negara
- h. Penetapan rencana Induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
- i. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub internasional dan nasional;
- j. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- k. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional dan penetapan DUKS di pelabuhan regional;
- l. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus ;
- m. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
- n. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
- o. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional dan internasional;
- p. Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut regional;
- q. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
- r. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut dan pelabuhan khusus regional;
- s. Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;

- t. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- u. Pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi;
- v. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
- w. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau dan penetapan kelas alur pelayaran sungai;
- x. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 di tugas pembantuankan kepada Provinsi;
- y. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana ASDP Sumatera Selatan.
- z. Pengadaan Kapal ASDP
- aa. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar di perairan daratan dan laut.
- bb. Memberikan pelayanan pengesahan gambar rancang bangun kapal pedalaman yang baru.

## **6. Bidang Perhubungan Udara**

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Perhubungan Udara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik, operasi keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan angkutan udara;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Udara membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Teknik Bandara
- b. Seksi Keselamatan Penerbangan
- c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara

- a. Seksi Teknik Bandara

(1) Seksi Teknik Bandara mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang teknik bandara.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi teknik bandara mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik serta sertifikasi kelaikan udara;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan teknik bandara;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas seksi teknik bandara :

- a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengendalian, mengoperasikan bandar udara, pelayanan fasilitas elektronika & listrik di bandar udara serta pelayanan sisi udara dan darat di bandar udara ;
- b. Melaksanakan pelayanan perizinan lokasi, pembangunan dan pengoperasian bandar udara dan pendaratan helikopter (Heli Port/Helipad)
- c. Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional bandar udara.
- d. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
- e. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- f. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk.
- g. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan

melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.

- h. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pada pemerintah.
- i. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan – pemadam kebakaran (PKP- PK) salvage, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- j. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- k. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- l. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.
- m. Pemantauaan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- n. Pemantauaan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara.
- o. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas  $< 30$  (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus.
- p. Pemberian arahan, dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggsraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk peraturan pemerintah daerah.

b. Seksi Keselamatan Penerbangan

(1) Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang keselamatan penerbangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi keselamatan penerbangan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengkoodinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara, fasilitas elektronika dan listrik, operasi keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan angkutan udara;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara.

(3) Rincian tugas seksi keselamatan udara :

- a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan kelaikan pesawat udara, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan;
- b. Melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan penetapan kawasan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan;
- c. Membantu pelayanan tim sertifikasi kelaikan pesawat udara Ditjen Perhubungan Udara.
- d. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan di wilayah kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) ;
- e. Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional keselamatan penerbangan.
- f. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- g. Pemantauan terhadap sertifikat fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- h. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.

- i. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- j. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- k. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- l. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.
- m. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara :
  - ❖ membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan
  - ❖ Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.
  - ❖ Membantu kelancaran keimigrasian Tim investigasi warga asing.

c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara mempunyai tugas pokok sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan udara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, seksi lalu lintas dan angkutan udara mempunyai fungsi :
  - a. Pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan udara;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas seksi lalu lintas dan angkutan udara :

- a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pengangkutan orang dan barang melalui bandar udara, pengangkutan barang berbahaya, jaringan
- b. Pelayanan lalu lintas udara dan jasa ekspedisi muatan pesawat udara serta penunjang kegiatan bandar udara;
- c. Melaksanakan pengendalian rute penerbangan (air operator certificate) dan flight approval;
- d. Melaksanakan pelayanan perizinan pengangkutan barang/ bahan berbahaya dengan pesawat udara;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan usaha ekspedisi muatan pesawat udara dan penunjang kegiatan bandar udara;
- f. Melaksanakan pengawasan kegiatan kantor perwakilan/ agen penjualan umum (GSA) dan kegiatan angkutan udara oleh perusahaan angkutan udara asing;
- g. Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional angkutan udara.
- h. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin udara niaga dan melaporkan ke pemerintahan.
- i. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
- j. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.
- k. Mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.
- l. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.
- m. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
- n. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/ FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.
- o. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.
- p. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/ FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/ kota



dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.

- q. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
- r. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah.
- s. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah.
- t. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
- u. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
- v. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.
- w. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.
- x. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/ dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.

## **7. Bidang Pos dan Telekomunikasi**

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam Bidang Pos, Telekomunikasi dan Monitoring & Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Postel dan Monitoring & Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan Program Pos, Telekomunikasi dan Monitoring & Evaluasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di Bidang Pos, Telekomunikasi dan Monitoring & Evaluasi;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pos, Telekomunikasi dan Monitoring & Evaluasi;
- d. Melaksanakan Monitoring & Evaluasi dengan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pos
- b. Seksi Telekomunikasi
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Postel

- a. Seksi Pos

Seksi Pos mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan perposan, dan standarisasi bidang pos;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan filateli;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data bidang perposan, dan standarisasi bidang pos;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi/asosiasi dibidang pos;
- e. Melaksanakan Koordinasi, pemantauan dan pendataan hasil pembangunan fasilitas pos untuk daerah perintis/pedesaan;
- f. Menerbitkan rekomendasi pendirian usaha jasa titipan untuk kantor pusat dan izin pendirian kantor cabang dan agen usaha jasa titipan;
- g. Melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dibidang pos;
- h. Melaksanakan pembinaan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam kegiatan bidang perposan.
- i. Memfasilitasi pertemuan dengan instansi Pemerintah.

- b. Seksi Telekomunikasi

Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Subdin melaksanakan pembinaan dibidang telekomunikasi khusus.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap hasil pembangunan fasilitas telekomunikasi.
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pendidikan radio elektronika.
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap operator seluler.
- e. Melaksanakan pembinaan, pendataan dan pemantauan pembangunan fasilitas telekomunikasi perintis (USO).
- f. Pemberian izin amatir radio (IAR) dan pengamanan perangkat radio amatir (PPRA), izin komunikasi radio antar penduduk (IRAP) dan izin

penggunaan alat perangkat komunikasi radio antar penduduk (IPPKRAP).

- g. Melaksanakan ujian kecakapan amatir radio.
- h. Pemberian izin galian untuk keperluan pergelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi.
- i. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi.
- j. Pemberian izin Kantor Cabang dan loket pelayanan operator.
- k. Pemberian bimbingan teknis dibidang standar telekomunikasi tehnik komunikasi radio.
- l. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya Provinsi.
- m. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan Provinsi.

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Postel

Seksi Monitoring dan Evaluasi Postel mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perifikasi izin stasiun radio.
- b. Melaksanakan monitoring penggunaan frekwensi radio.
- c. Melaksanakan inspeksi instalasi alat/perangkat yang menggunakan spektrum dan kesesuaian standarnya.
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana monitoring frekwensi radio.
- e. Pembinaan terhadap pembangunan tower.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan pelaksanaan monitoring.
- g. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Postel dan Monitoring Evaluasi.
- h. Membuat Laporan terhadap hasil evaluasi Bidang Postel dan Monitoring Evaluasi.
- i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- j. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- k. Pelaksanaan pengelolaan pendapat umum.

## **8. Bidang Aplikasi dan Telematika**

Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Bidang Aplikasi dan Telematika. serta melaksanakan kebijakan dan Audit teknis Teknologi informatika dan Komunikasi di bidang aplikasi dan telematika.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta dan audit aplikasi telematika;
- e. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi dan Telematika membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten
- b. Seksi Pemberdayaan Telematika
- c. Seksi Audit Aplikasi dan Telematika
- a. Seksi Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten

Seksi Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;

- b. Penyiapan, penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi.
- c. Penyiapan, penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perangkat lunak dan konten.
- d. Menyiapkan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang terdiri dari :
  - 1. Analisa data dan perencanaan pendataan;
  - 2. Pengumpulan data dan perekaman ke system computer;
  - 3. Klasifikasi data (input control)
  - 4. Verifikasi data (output control)
- e. Pemberian bimbingan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pembangunan pengembangan dan pengendalian system informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Pelaksanaan kemutakhiran data yang telah diolah ke komputerisasi guna akurasi data.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Pemberdayaan Telematika

Seksi Pemberdayaan Telematika mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. Penyiapan, penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan telematika daerah dan pemberdayaan usaha telematika
- c. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi/telematika;
- d. Penyiapan bahan dalam penyusunan rencana dan program dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi daerah;
- e. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintah daerah;
- f. Pengkontribusian data melalui jaringan komunikasi data;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Audit Aplikasi dan Telematika

Seksi Audit Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. Penyiapan, penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang audit sistem informasi, audit sistem keamanan dan audit konten.
- c. Penyiapan prosedur pembangunan & pengembangan system informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan komunikasi;
- d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika.
- e. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika.
- f. Pelaksanaan perumusan kebijakan standar di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**9. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi**

Bidang Sarana dan Komunikasi dan Diseminasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media.

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media.
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan komunikasi kelembagaan pemerintah daerah dan kemitraan media.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi membawahi 3 (tiga) seksi :

- a. Seksi Penyiaran
- b. Seksi Kemitraan Media
- c. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Komunikasi Pemerintah

- a. Seksi Penyiaran

Seksi Penyiaran mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan dibidang jaringan penyiaran
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana penyiaran
- d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan dibidang teknologi penyiaran
- e. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan dibidang perizinan penyelenggara penyiaran
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dibidang pemetaan usaha penyiaran

b. Seksi Kemitraan Media

Seksi Kemitraan Media mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan program kemitraan dengan media radio.
- b. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan program kemitraan dengan media televisi.
- c. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan program kemitraan dengan media cetak.
- d. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan program kemitraan dengan media komunitas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Komunikasi Pemerintah

Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Komunikasi Pemerintah mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pemberdayaan lembaga media tradisional
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pemberdayaan lembaga komunikasi pedesaan
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pemberdayaan lembaga profesi
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pemberdayaan lembaga pemantau media.



## **10. Unit Pelaksanaan Teknis Penimbangan Kendaraan Bermotor**

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Dinas Perhubungan di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Penimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoperasian jembatan timbang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Penimbangan Kendaraan bermotor di jembatan timbang;
- c. Penimbangan portable di lokasi-lokasi tertentu;
- d. Penyidikan pelanggaran kelebihan muatan;
- e. Pemeriksaan dan penyidikan terhadap ukuran kendaraan termasuk muatan serta tata cara kendaraan barang di jembatan timbang;
- f. Pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran ketentuan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan barang yang patut diduga melanggar di jembatan timbang;
- g. Pembuatan laporan penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang;
- h. Pembuatan laporan pendataan arus barang di jembatan timbang.

Susunan Organisasi UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor terdiri dari :

### **(1) Kepala UPTD**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Perhubungan di bidang penimbangan kendaraan bermotor.

Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan arus angkutan barang yang melalui unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
- b) Pengaturan tugas pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor;
- c) Penerimaan laporan unit-unit penimbangan kendaraan bermotor;
- d) Pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan kepada Kepala Dinas;
- e) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- f) Pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

## **(2) Sub Bagian Tata Usaha**

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan pengaturan personil yang bertugas di jembatan timbang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengelolaan, urusan ketatausahaan di jembatan timbang;
- b) Penyusunan rencana program penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c) Pelaksanaan pengaturan, penjadwalan bagi personil yang bagus di jembatan timbang;

## **(3) Seksi Bina Fasilitas**

Seksi Bina Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan urusan dan menjaga keutuhan dan berfungsinya peralatan dan fasilitas jembatan timbang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Bina Fasilitas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan kebersihan dan keutuhan fasilitas jembatan timbang;
- b) Pembuatan laporan keadaan fasilitas jembatan timbang kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- c) Pengusulan pemeliharaan fasilitas jembatan timbang.

## **(4) Seksi Pengumpulan dan pengolahan Data**

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpul, pengolahan dan penyajian data hasil penimbangan, termasuk data arus barang dalam bentuk laporan berkala.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengumpulan dan pengolahan data;
- b) Penyajian data yang diperlukan;
- c) Penyampaian data dalam bentuk laporan;
- d) Penyimpanan dan pengarsipan data.

## **(5) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD penimbangan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## **11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Susunan Organisasi UPTD Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri dari :

### **1) Kepala UPTD**

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional angkutan kapal penumpang dengan menggunakan bus air milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Pengawasan terhadap pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya di perairan;
- d. Pengawasan terhadap illegal logging dan illegal fishing;
- e. Penertiban terhadap kelengkapan administrasi dan alat-alat keselamatan kapal-kapal sungai dan danau;
- f. Pelaksanaan patroli sungai secara reguler;
- g. Pengkoordinasian dalam pencegahan penanggulangan bencana ataupun musibah/kecelakaan di perairan.

### **2) Sub Bagian Tata Usaha**

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keluarga, kepegawaian, umum, humas dan perencanaan di bidang Penyelenggaraan dan Pembinaan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan humas;
- b) Penyiapan dan pelaksanaan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang Penyeberangan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **3) Seksi Operasional**

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengaturan sarana dan prasarana, kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas angkutan barang dan orang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pengaturan jadwal operasional kapal patroli dan bus air;
- b. Pembuatan usulan kebutuhan personil operasional;
- c. Pelaksanaan operasional kapal patroli;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan barang dan orang;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran;
- f. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran;
- g. Pemberian izin operasional bagi kapal-kapal pedalaman;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/Kota;
- i. Pelaksanaan pemungutan jasa uang lambat, labuh, ship to ship dan jasa lainnya di lingkungan kerja pelabuhan dan lingkungan kepentingan pelabuhan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk laporan serta menyimpan dan mengarsipkan data.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengumpulan dan pengolahan data;
- b) Penyajian data;
- c) Penyampaian data dalam bentuk laporan;
- d) Penyimpanan dan pengarsipan data;
- e) Pelaksanaan tugas yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **5) Seksi Teknis**

Seksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan teknis perencanaan, pembangunan, pemeriksaan dan pemeliharaan kapal serta pelabuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan kapal-kapal baru;
- b. Pelaksanaan teknis pemeriksaan kapal;
- c. Pelaksanaan teknis pembangunan atau pengembangan pelabuhan;
- d. Pelaksanaan teknis pemeliharaan dan operasional kapal;
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi keselamatan pelayaran;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **II.3 Sumber Daya SKPD**

Untuk menjalankan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan seperti tersebut diatas, maka sumber daya yang dimiliki, saat ini SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 274 pegawai yang tersebar pada 12 Bidang dan UPTD



Tabel II.22  
Kinerja Pelayanan SKPD

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD  
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
	SPM Bidang Perhubungan																		
A.	Angkutan Jalan																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan																		
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi	100%			100%	100%	100%	100%	100%	97%	97,5%	98%	99%	100%	0.97	0.975	0.98	0.99	1.00
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan																		
	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100%			100%	100%	100%	100%	100%	80%	82%	85%	88%	90%	0.80	0.82	0.85	0.88	0.90
3	Fasilitas Perlengkapan Jalan																		
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi	100%			100%	100%	100%	100%	100%	40%	50%	60%	70%	80%	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80
4	Keselamatan																		
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	100%			100%	100%	100%	100%	100%	78%	81%	85%	87%	90%	0.78	0.81	0.85	0.87	0.90
5	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
B.	Angkutan Sungai dan Danau																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau																		
	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	100%			100%	100%	100%	100%	100%	95.5%	96%	96.5%	97%	98%	0.955	0.96	0.965	0.97	0.98
2	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau																		
	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam	100%			100%	100%	100%	100%	100%	88.9%	90%	92%	94%	95%	0.88	0.90	0.92	0.94	0.95

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
	Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
	SPM Bidang Perhubungan																		
3.	Keselamatan																		
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	72%	75%	78%	80%	82%	0.72	0.75	0.78	0.80	0.82
4	Sumber Daya Manusia																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
C.	Angkutan Penyeberangan																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan																		
	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan																		
	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	100%			100%	100%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	90%	95%	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
3.	Keselamatan																		
	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	80%	82%	85%	88%	90%	0.80	0.82	0.85	0.88	0.90
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



[illegible]

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
	SPM Bidang Perhubungan																		
D.	Angkutan Laut																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut																		
	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
2.	Jaringan Prasarana Angkutan Laut																		
	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
3.	Keselamatan																		
	Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	72%	75%	78%	80%	85%	0.72	0.75	0.78	0.80	0.85
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%			100%	100%	100%	100%	100%	96.6%	97%	98%	99%	100%	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

Adapun capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada pelaksanaan periode Rencana Strategi (Renstra) tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

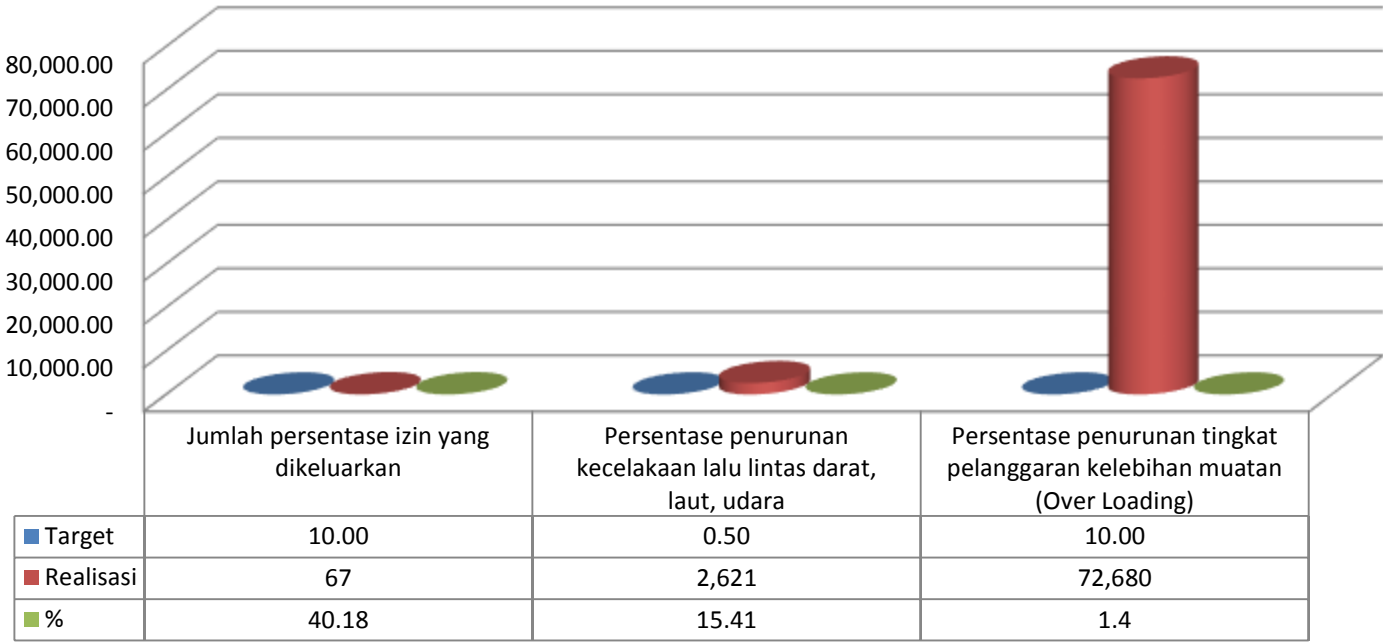
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel II.23  
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Terakhir  
Renstra 2009 – 2013 Bidang Perhubungan

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2013			
		Satuan	Target (%)	Realisasi	%
1.	Jumlah Persentase Izin yang Dikeluarkan	Izin	10	67	40,18
2.	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Darat, Laut, Udara	Kasus	0,50	2.261	15,41
3.	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Kelebihan Muatan (Over Loading)	Kasus	10	72.680	1,4

Gambar II.1

GRAFIK CAPAIAN TAHUN 2013



Adapun capaian Indikator Kinerja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. Jumlah Persentase Izin yang Dikeluarkan.**

1. Jumlah persentase izin yang dikeluarkan pada tahun 2013 di targetkan 10% dari jumlah izin yang di keluarkan pada tahun 2012 yaitu 112 izin (107 izin trayek dan 5 izin insidentil) dan pada tahun 2013 hanya terealisasi sebanyak 67 izin (41 izin trayek dan 26 izin insidentil) atau sebesar 40,18% dari tahun 2012.
2. Izin yg dikeluarkan tersebut dinilai sesuai, dikarenakan untuk perpanjangan izin trayek hanya di lakukan setiap 5 tahun sekali sehingga untuk tahun 2013 hanya dikeluarkan sebanyak 67 izin dan untuk izin insidentil yang meningkat menjadi 26 izin, hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya keinginan dari pemilik angkutan umum untuk menggunakan kendaraannya secara pribadi selama masa angkutan lebaran tahun 2013.
3. Untuk itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin terus melakukan sosialisasi dan penertiban kepada pemilik konsorsium angkutan umum agar selalu memperpanjang izin trayek untuk kendaraan – kendaraannya agar dapat terus beroperasi. Dan untuk kendaraan umum yang akan digunakan untuk angkutan pribadi untuk jangka pendek harus mempunyai izin insidentil.

**B. Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Darat, Laut dan Udara.**

1. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas darat, laut dan udara di tahun 2013 di targetkan menurun menjadi 0,50% dan terealisasi hanya sebesar 15,41%.
2. Pada tahun 2013 terjadi sebanyak 2.217 kasus kecelakaan lalu lintas angkutan jalan sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 2.621 kasus kecelakaan lalu lintas angkutan jalan.
3. Untuk kecelakaan angkutan laut dan angkutan udara belum terdata pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut pada poin 3, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan masih fokus pada Angkutan Jalan dikarenakan jumlah kecelakaan angkutan jalan ini masih mendominasi pada jenis kecelakaan yang terjadi.
5. Namun pada tahun yang akan datang akan terus dilaksanakan upaya penurunan kecelakaan lalu lintas darat, laut dan udara melalui upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas yaitu dengan cara Sosialisasi Berkendaraan Di Jalan Raya, Kampanye Keselamatan Transportasi, Kegiatan

Pelajar Pelopor, Pemberian Penghargaan Terhadap Angkutan-Angkutan Teladan Dan Melakukan Pemasangan Fasilitas Keselamatann Lalu Lintas.

6. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas darat, laut, dan udara pada tahun 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan antara tahun 2012. Upaya penertiban kendaraan di jalan raya telah di tingkatkan dan akan terus dilaksanakan monitoring terhadap penertiban pengendara untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, untuk mendukung program "*Road Map To Zero Accident*".
7. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara yang dikeluarkan sampai dengan Tahun 2013 mencapai 15,41% dan diharapkan pada akhir Tahun 2014 semakin diperkecil melalui program Lalu lintas angkutan jalan dengan cara bimbingan teknis berkendara, sosialisasi keselamatan berkendara di jalan, dikarenakan kecelakaan darat mendominasi jumlah kecelakaan yang terjadi.

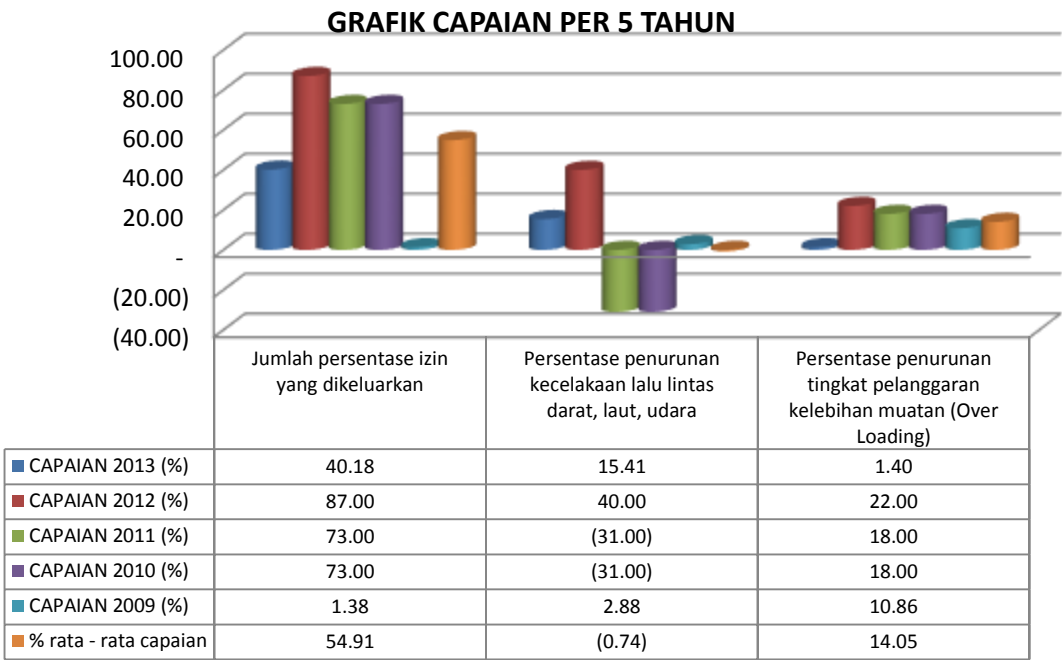
#### **C. Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Kelebihan Muatan (Overlading)**

1. Persentase penurunan tingkat pelanggaran kelebihan muatan (*over loading*) pada tahun 2013 di targetkan turun 10% dan pada kenyataannya naik sebesar 1,4% atau sebanyak 72.680 kasus pelanggaran kelebihan muatan lebih besar dari pada tahun 2012 dimana hanya terjadi pelanggaran kelebihan sebanyak 71.663 kasus pelanggaran.
2. Kenaikan tersebut diakibatkan masih banyaknya angkutan yang mengangkut barang melebihi kapasitas angkut.
3. Dalam hal ini jembatan timbang belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kelebihan muatan. Upaya penurunan tingkat pelanggaran kelebihan muatan ini akan terus di tingkatkan melalui program Penanggulangan Kelebihan Muatan dengan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya dan Pemeliharaan Alat – alat Ukur dan Penggantian Suku Cadang dari Masing – Masing Pos Penimbangan Terpadu.

Tabel II.24  
Indikator Kinerja dan Prosentase Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahunan Bidang Perhubungan

INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2013 (%)	CAPAIAN 2012 (%)	CAPAIAN 2011 (%)	CAPAIAN 2010 (%)	CAPAIAN 2009 (%)	% rata - rata capaian
1.	Jumlah persentase izin yang dikeluarkan	Izin	40,18	87,00	73,00	73,00	1,38	54,91
2.	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara	Kasus	15,41	40,00	(31,00)	(31,00)	2,88	(0,74)
3.	Persentase penurunan tingkat pelanggaran kelebihan muatan (Over Loading)	Kasus	1,40	22,00	18,00	18,00	10,86	14,05

Gambar II.2

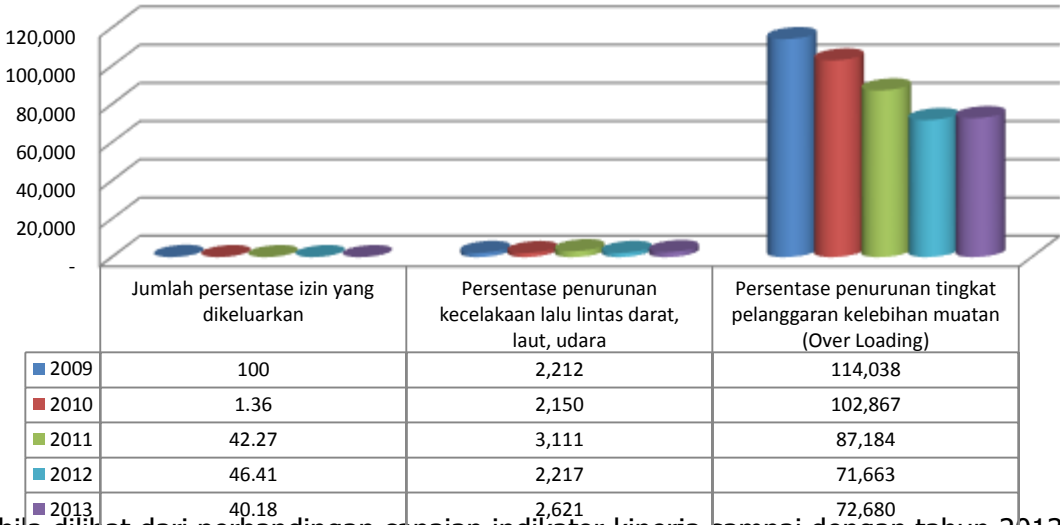


Tabel II.25  
Indikator Kinerja dan Capaian Realisasi 5 (Lima) Tahunan Bidang Perhubungan

INDIKATOR		CAPAIAN						Naik (turun)	Ket
		SATUAN	REALISASI						
			2009	2010	2011	2012	2013		
1.	Jumlah persentase izin yang dikeluarkan	Izin	100	1,36	42,27	46,41	40,18	6,23	naik
2.	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara	Kasus	2.212	2.150	3.111	2.217	2.621	-404,00	turun
3.	Persentase penurunan tingkat pelanggaran kelebihan muatan (Over Loading)	Kasus	114.038	102.867	87.184	71.663	72.680	-1017,00	turun

Gambar II.3

GRAFIK REALISASI CAPAIAN PER 5 TAHUN



Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2013 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.26  
Indikator Kinerja dan Prosentase Capaian Realisasi Kinerja Bidang Perhubungan

INDIKATOR		CAPAIAN						Realisasi s.d 2013	Capaian %
		SATUAN	REALISASI						
			2009	2010	2011	2012	2013		
1.	Jumlah persentase izin yang dikeluarkan	Izin	367	362	209	112	67	1.117	40,18
2.	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara	kasus	2.212	2.150	3.111	2.217	2.261	11.951	15,41
3.	Persentase penurunan tingkat pelanggaran kelebihan muatan (Over Loading)	kasus	114.038	102.867	87.184	71.663	72.680	448.432	1,4

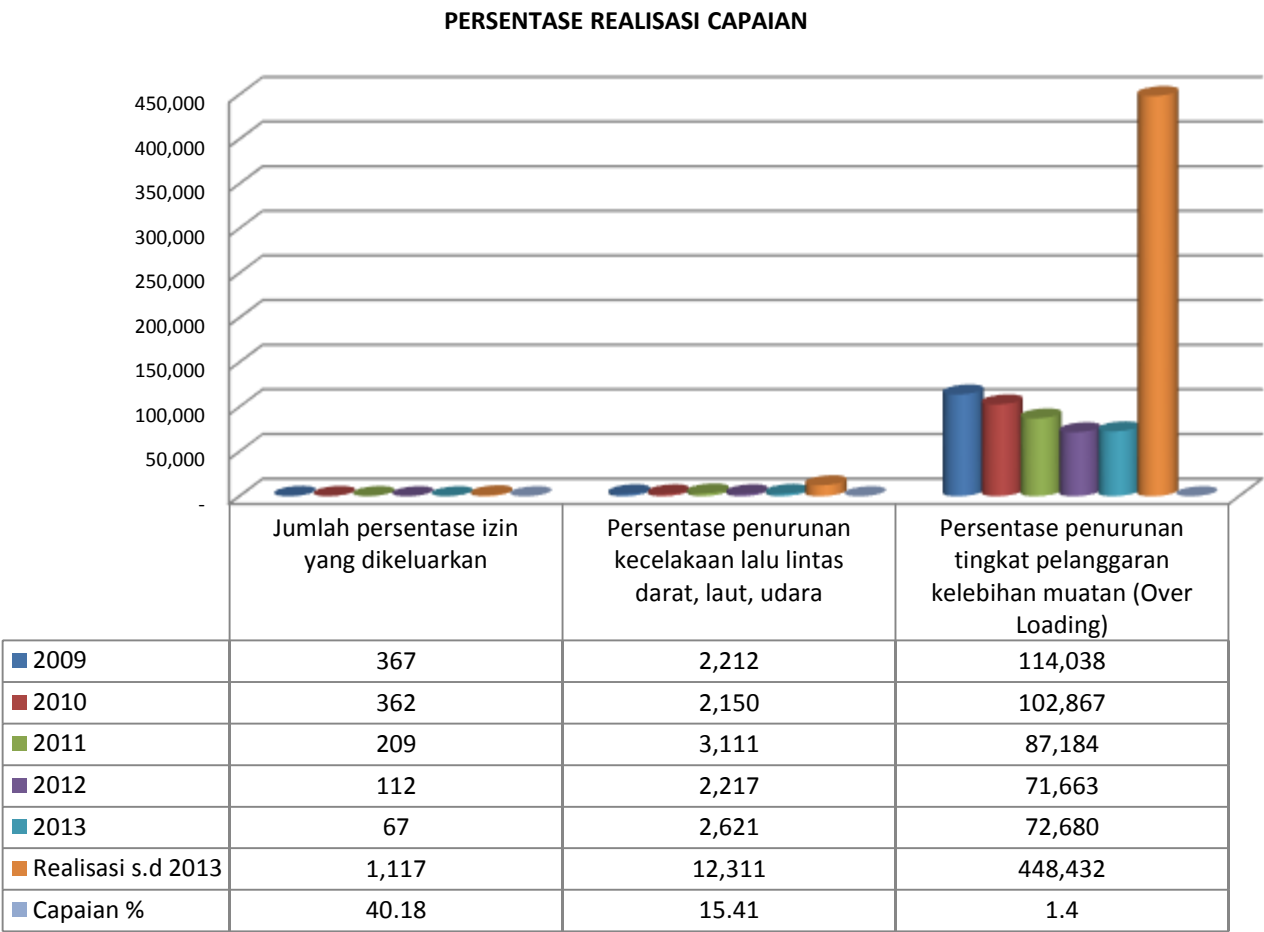
**Keterangan :**

Warna Ungu : Persentase Capaian > 100%

Warna Kuning : Persentase Capaian = 100%

Warna Biru : Persentase Capaian < 100%

Gambar II.4





#### **A. Jumlah Persentase Izin yang Dikeluarkan.**

1. Pada tahun 2009 izin yang dikeluarkan sebanyak 367 izin (341 izin trayek dan 26 izin insidentil) atau sebanyak 100%.
2. Pada tahun 2010 izin yang dikeluarkan sebanyak 362 izin (338 izin trayek dan 24 izin insidentil) atau sebanyak 1,36% naik dari tahun 2009.
3. Pada tahun 2011 izin yang dikeluarkan sebanyak 209 izin (197 izin trayek dan 12 izin insidentil) atau sebanyak 42,27% turun dari tahun 2010.
4. Pada tahun 2012 izin yang dikeluarkan sebanyak 112 izin (107 izin trayek dan 5 izin insidentil) atau sebanyak 46,41% turun dari tahun 2011.
5. Pada tahun 2013 izin yang dikeluarkan sebanyak 67 izin (107 izin trayek dan 5 izin insidentil) atau sebanyak 40,18% turun dari tahun 2012.
6. Total izin yang dikeluarkan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 1.117 izin yang terdiri dari 1.024 izin trayek dan 93 izin insidentil.
7. Capaian izin di tahun 2013 adalah sebesar 40,18% dari tahun 2012.

#### **B. Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Darat, Laut dan Udara.**

1. Pada tahun 2009 terjadi sebanyak 2.212 kasus kecelakaan.
2. Pada tahun 2010 terjadi sebanyak 2.150 kasus kecelakaan, turun sebanyak 2,88% dari tahun 2009.
3. Pada tahun 2011 terjadi sebanyak 3.111 kasus kecelakaan, naik sebanyak 30,89% dari tahun 2010.
4. Pada tahun 2012 terjadi sebanyak 2.217 kasus kecelakaan, turun sebanyak 40,32% dari tahun 2011.
5. Pada tahun 2013 terjadi sebanyak 2.217 kasus kecelakaan, naik sebanyak 15,41% dari tahun 2012.
6. Total kecelakaan yang terjadi selama tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebanyak 12.311 kasus kecelakaan.
7. Persentase kecelakaan yang tercatat pada tahun 2013 adalah sebesar 15,41% naik dari tahun 2012.

#### **C. Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Kelebihan Muatan (Overlading)**

1. Pada tahun 2009 terjadi pelanggaran sebanyak 114.038 kasus pelanggaran kelebihan muatan.
2. Pada tahun 2010 pelanggaran yang terjadi sebanyak 102.867 kasus pelanggaran, atau turun sebesar 10,68% dari tahun 2009.
3. Pada tahun 2011 pelanggaran yang terjadi sebanyak 87.184 kasus pelanggaran, atau turun sebesar 17,99% dari tahun 2010.

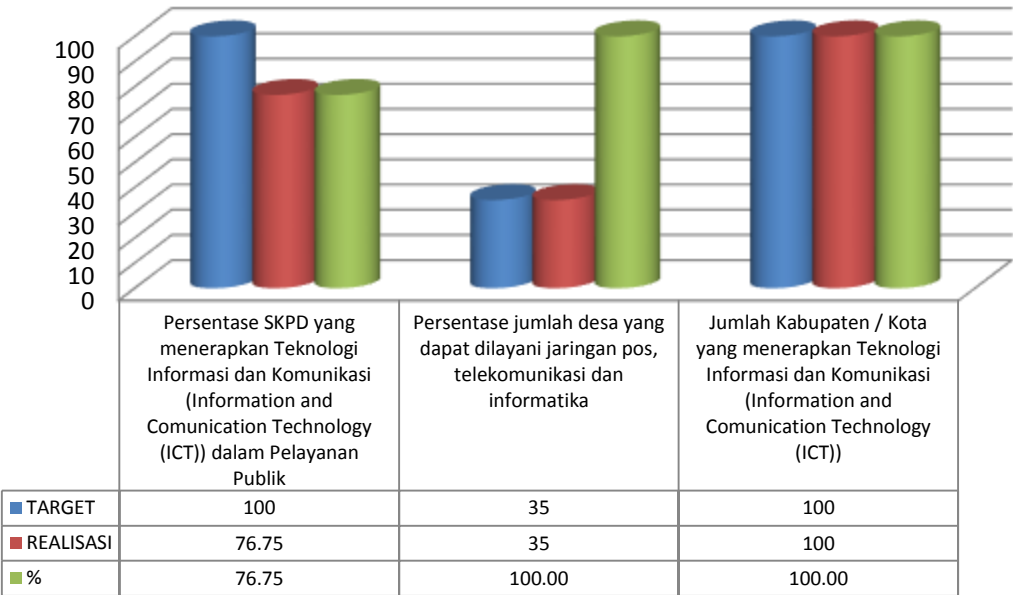
- 4. Pada tahun 2012 pelanggaran yang terjadi sebanyak 71.663 kasus pelanggaran, atau turun sebesar 21,66% dari tahun 2011.
- 5. Pada tahun 2013 pelanggaran yang terjadi sebanyak 72.680 kasus pelanggaran, atau naik sebesar 1,4% dari tahun 2012.
- 6. Total kasus pelanggaran kelebihan muatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 448.432 kasus.
- 7. Persentase penurunan pelanggaran kelebihan muatan pada tahun 2013 sebesar 1,4% dari tahun 2012 dan tidak mencapai target yang di tentukan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel II.27  
Indikator Kinerja dan Prosentase Capaian Tahun Terakhir  
Renstra 2009 – 2013 Bidang Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2013			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase SKPD yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication Technology (ICT)) dalam Pelayanan Publik	%	100	76	76
2.	Persentase Jumlah desa yang dapat dilayani jaringan pos, telekomunikasi dan informatika	%	35	35	100
3.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication Technology (ICT))	%	100	100	100

Gambar II.5  
GRAFIK CAPAIAN TAHUN 2013



Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. Persentase SKPD yang menerapkan ICT dalam Pelayanan Publik**

1. Jumlah persentase SKPD yang menerapkan ICT terhadap pelayanan Publik pada tahun 2013 di targetkan 100% dan terealisasi 76% atau sebanyak 76 SKPD.
2. Penerapan ICT ini terhadap pelayanan publik masih sangat rendah hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan ICT dan di beberapa Kabupaten masih terbatasnya jaringan internet serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi.
3. Untuk tahun yang akan datang, akan terus dilaksanakan peningkatan melalui program kerjasama informasi dan media massa, dan program pengembangan aplikasi telekomunikasi.

**B. Persentase jumlah Desa yang dapat dilayani Pos, Telekomunikasi dan Informatika.**

1. Persentase jumlah desa yang dapat dilayani jaringan pos, telekomunikasi dan informatika pada tahun 2013 di targetkan 35 desa dan terealisasi dan terealisasi 100%.
2. Untuk tahun yang akan datang akan terus diupayakan agar seluruh desa yang ada di Sumatera Selatan dapat terlayani sepenuhnya.
3. Upaya penerapan pelayanan pos, telekomunikasi dan informatika tersebut akan dilaksanakan melalui program pengembangan pos dan telekomunikasi dengan kegiatan Pembinaan Radio Antar Penduduk Indonesia, Pengadaan dan Pemasangan Tower Telekomunikasi dan bimbingan teknis program terkait.

**C. Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

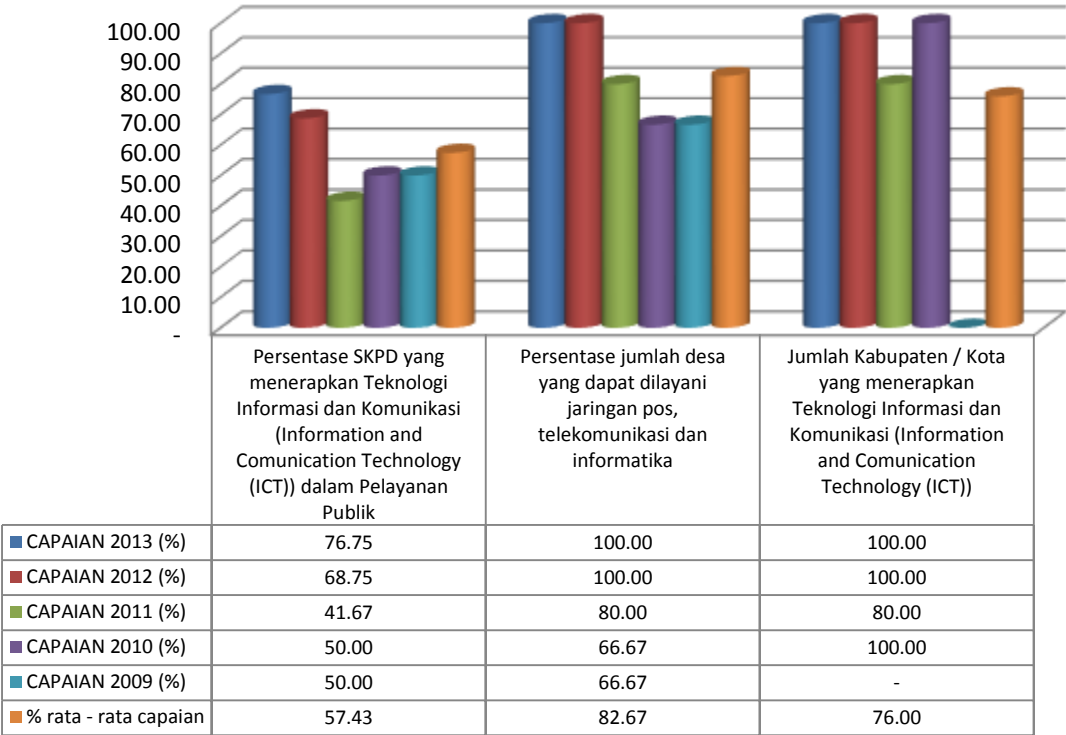
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan ICT pada tahun 2013 di targetkan 100% dan terealisasi 100%.
2. Dari 15 Kota / Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan telah menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pada tahun 2013 ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan : sistem penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sistem administrasi pelayanan kepegawaian, pelayanan mandiri melalui website pada masing-masing SKPD.
4. penerapan ICT ini telah mencapai 100%. Pada tahu yang akan datang, terus dilakukan program pengembangan aplikasi telekomunikasi dengan kegiatan

Bimbingan Teknis Teknologi Informasi, Pelayanan Website Pemprov Sumsel dan Sumatera Selatan Wi – Fi Area.

Tabel II.28  
Indikator Kinerja dan Prosentase Capaian Kinerja 5 (Lima) Tahunan Bidang Kominfo

INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2013 (%)	CAPAIAN 2012 (%)	CAPAIAN 2011 (%)	CAPAIAN 2010 (%)	CAPAIAN 2009 (%)	% rata - rata capaian
1.	Persentase SKPD yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication Technology (ICT)) dalam Pelayanan Publik	%	76,75	68,75	41,67	50,00	50,00	57,43
2.	Persentase jumlah desa yang dapat dilayani jaringan pos, telekomunikasi dan informatika	%	100,00	100,00	80,00	66,67	66,67	82,67
3.	Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication Technology (ICT))	%	100,00	100,00	80,00	100,00	-	76,00

Gambar II.6  
GRAFIK CAPAIAN PER 5 TAHUN

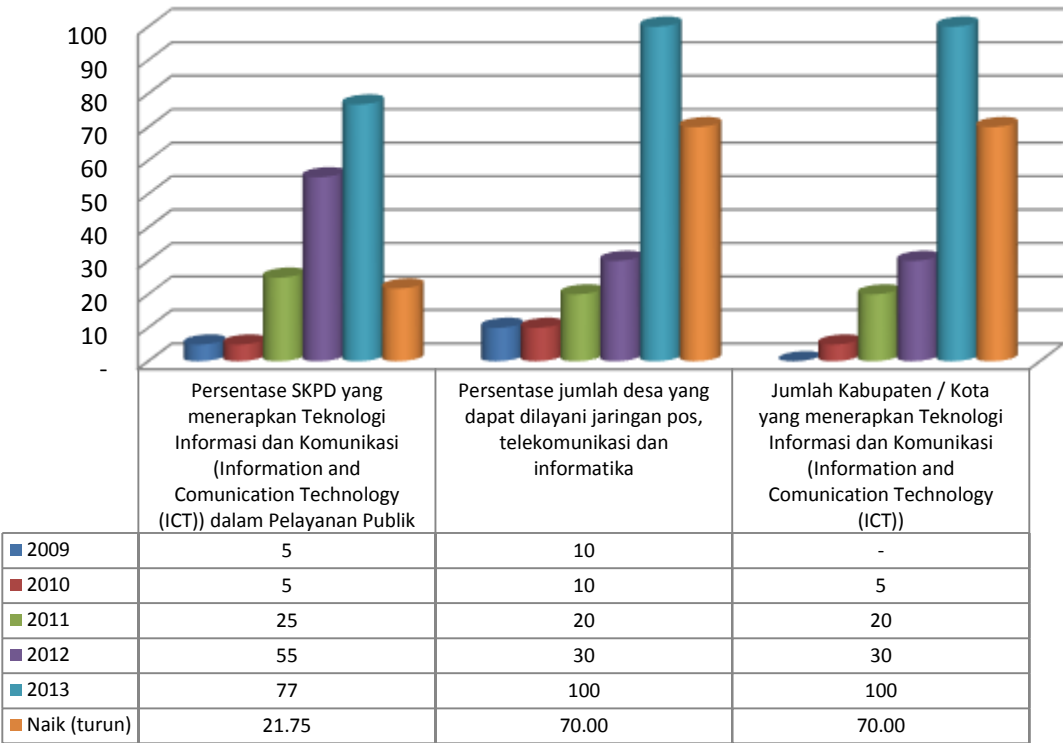


Tabel II.29  
Indikator Kinerja dan Prosentase Capaian Realisasi 5 (Lima) Tahunan

INDIKATOR		CAPAIAN					Naik (turun)	Ket	
		SATUAN	REALISASI						
			2009	2010	2011	2012			2013
1.	Persentase SKPD yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication Technology (ICT)) dalam Pelayanan Publik	%	5	5	25	55	77	21,75	naik
2.	Persentase jumlah desa yang dapat dilayani jaringan pos, telekomunikasi dan informatika	%	10	10	20	30	100	70,00	naik
3.	Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication Technology (ICT))	%	-	5	20	30	100	70,00	naik

Gambar II.7

REALISASI CAPAIAN PER 5 TAHUN



Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2013 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.30  
Indikator Kinerja dan Prosentase Capaian Realisasi 5 (Lima) Tahunan

Indikator Kinerja		Capaian					Realisasi s.d 2013	Capaian %	
		Satuan	Realisasi						
			2009	2010	2011	2012			2013
1.	Persentase SKPD yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication Technology (ICT)) dalam Pelayanan Publik	%	5	5	25	55	76,75	166,75	76,75
2.	Persentase Jumlah desa yang dapat dilayani jaringan pos, telekomunikasi dan informatika	%	10	10	20	30	100	170,00	100
3.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication Technology (ICT))	%	-	5	20	30	100	155,00	100

**Keterangan :**

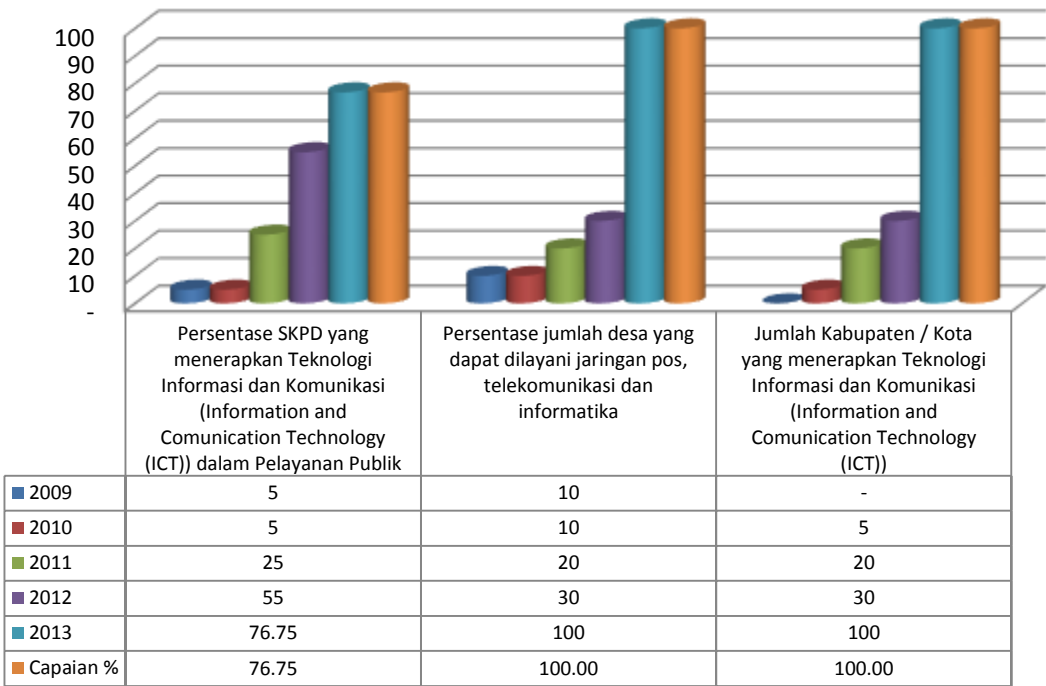
Warna Ungu : Persentase Capaian > 100%

Warna Kuning : Persentase Capaian = 100%

Warna Biru : Persentase Capaian < 100%

Gambar II.8

GRAFIK CAPAIAN PER 5 TAHUN



A. Persentase SKPD yang menerapkan ICT dalam Pelayanan Publik

1. Pada tahun 2009 persentase SKPD yang menerapkan ICT dalam pelayanan publik sebesar 5%.
2. Pada tahun 2010 persentase SKPD yang menerapkan ICT dalam pelayanan publik sebesar 5%, tidak ada perubahan dari tahun 2009.
3. Pada tahun 2011 persentase SKPD yang menerapkan ICT dalam pelayanan publik sebesar 25%, naik dari tahun 2010.
4. Pada tahun 2012 persentase SKPD yang menerapkan ICT dalam pelayanan publik sebesar 55%, naik dari tahun 2011.
5. Pada tahun 2013 persentase SKPD yang menerapkan ICT dalam pelayanan publik sebesar 76,75%, naik dari tahun 2012.
6. Total realisasi persentase SKPD yang menerapkan ICT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebanyak 166,75%.
7. Capaian persentase SKPD yang menerapkan ICT dalam pelayanan publik pada tahun 2013 adalah sebesar 76,75%

**B. Persentase jumlah Desa yang dapat dilayani Pos, Telekomunikasi dan Informatika.**

1. Pada tahun 2009, jumlah desa yang dapat dilayani oleh Pos, Telekomunikasi dan Informatika adalah sebesar 10%.
2. Pada tahun 2010, jumlah desa yang dapat dilayani oleh Pos, Telekomunikasi dan Informatika adalah sebesar 10%, tidak ada perubahan dari tahun 2009.
3. Pada tahun 2011, jumlah desa yang dapat dilayani oleh Pos, Telekomunikasi dan Informatika adalah sebesar 20%, naik dari tahun 2010.
4. Pada tahun 2012, jumlah desa yang dapat dilayani oleh Pos, Telekomunikasi dan Informatika adalah sebesar 30%, naik dari tahun 2011.
5. Pada tahun 2013, jumlah desa yang dapat dilayani oleh Pos, Telekomunikasi dan Informatika adalah sebesar 100%, naik dari tahun 2011.
6. Total realisasi persentase jumlah desa yang dapat dilayani oleh Pos, Telekomunikasi dan Informatika adalah sebesar 170% dari tahun 2009 sampai dengan 2013.
7. Capaian persentase jumlah desa yang dapat dilayani oleh Pos, Telekomunikasi dan Informatika pada tahun 2013 adalah sebesar 100%.

**C. Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

1. Pada tahun 2009 belum ada kabupaten / kota yang menerapkan teknologi ICT.
2. Pada tahun 2010 persentase kabupaten / kota yang menerapkan teknologi ICT adalah sebesar 5%.
3. Pada tahun 2011 persentase kabupaten / kota yang menerapkan teknologi ICT adalah sebesar 20%, naik dari tahun 2010.
4. Pada tahun 2012 persentase kabupaten / kota yang menerapkan teknologi ICT adalah sebesar 30%, naik dari tahun 2011.
5. Pada tahun 2013 persentase kabupaten / kota yang menerapkan teknologi ICT adalah sebesar 100%, naik dari tahun 2011.
6. Total realisasi persentase kabupaten / kota yang menerapkan teknologi ICT dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 155%.
7. Capaian realisasi persentase kabupaten / kota yang menerapkan teknologi ICT tahun 2013 adalah 100%.



### **BAB III**

#### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

###### **1. Urusan Bidang Perhubungan**

###### **a. Permasalahan Transportasi Darat;**

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan transportasi darat tidak terlepas dengan jaringan prasarana jalan yang ada. Dimana rata-rata kualitas jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kapasitas MST 8 – 10 Ton, sementara angkutan barang yang melintas di jalan umum masih ada yang melebihi kapasitas yang ada. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi darat diantaranya :

- 1) Belum tersedianya jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga sangat mengganggu kinerja pelayanan jalan umum;
- 2) Fasilitas perlengkapan jalan belum bisa memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2012 minimal 75% sudah harus terpenuhi di tahun 2014;
- 3) Masih belum optimalnya pelayanan beberapa terminal;
- 4) Belum adanya terminal khusus angkutan barang;
- 5) Pelanggaran terhadap kelebihan muatan masih terjadi;
- 6) Belum optimalnya kinerja angkutan umum;
- 7) Beberapa daerah terpencil belum tersentuh angkutan umum;
- 8) Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah;

###### **b. Permasalahan Transportasi SDP;**

Untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau disingkat SDP beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya diantaranya :

1. Minimnya jumlah pegawai yang berkompetensi dalam bidang penyelenggaraan sungai, danau dan penyeberangan;
2. Beberapa wilayah di Sumatera Selatan adalah perairan, sehingga perlu adanya angkutan sungai yang memadai untuk memfasilitasinya;
3. Belum optimalnya angkutan danau hal ini terkait dengan pengembangan danau sebagai objek pariwisata;
4. Fasilitas pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api masih minim perlu pengembangan;

5. Belum tersedianya dermaga untuk fasilitas kapal cepat di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
6. Belum tersedianya kolam pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api sebagai antisipasi mempertahankan kedalaman alur pelayaran;
7. Rendahnya pemahaman keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan sungai;
- c. Permasalahan Transportasi Pekeretaapian;
  1. Mahalnya pembiayaan untuk pembangunan jalan baru kereta api;
  2. Belum adanya kerjasama pembangunan pintu perlintasan sebidang kereta api antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota;
  3. Sinkronisasi peraturan pusat dan kebijakan daerah;
- d. Permasalahan Transportasi Laut;
  1. Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Api-api;
  2. Kendala alur pelayaran yang sempit dan dangkal sehingga sulit mengembangkan pelabuhan Boom Baru Palembang;
  3. Belum lengkapnya persyaratan untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat;
- e. Permasalahan Transportasi Udara;
  1. Kurangnya alokasi anggaran terhadap pembukaan rute pelayanan bandara baru;
- f. Permasalahan Transportasi Perkotaan;
  1. Kebijakan penataan transportasi perkotaan masih dibatasi dengan pengembangan transportasi masing-masing wilayah perkotaan di Kabupaten/Kota (belum terintegrasi);
- g. Permasalahan Transportasi Multimoda.
2. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
  - a. Belum adanya pengembangan TIK Sumatera Selatan;
  - b. Belum optimalnya kerjasama penataan penggunaan tower bersama telekomunikasi;
  - c. Masih banyak daerah yang minim akan informasi

### III.2 Telaaha Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan bahwa SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Adapun urusan wajib SKPD terbagi 2 (dua) yaitu urusan Perhubungan dan urusan Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur maka kebijakan Pemerintah Provinsi mengarah kepada adanya keterpaduan sistem transportasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mengurangi gap informasi sampai ke seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Adapun hasil penelaha terhadap visi dan misi Gubernur yang dikaitkan dengan tupoksi SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel III.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produktivitas)	1. Kawasan strategis Tanjung Api-api masih sangat minim fasilitas; 2. Masih banyak daerah masih minim pelayanan informasi	Alokasi anggaran APBD masih minim	Perlu dukungan APBN atau peran BUMN atau swasta murni dalam bentuk KPS
	Program Pembangunan Kawasan Tanjung Api-api			
2	Misi 2 : Memantapkan stabilitas daerah	Beberapa daerah Kabupaten/Kota masih minim pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika	Jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh	Perlu kerjasama antar Kabupaten/Kota mengenai satu kesisteman transportasi, komunikasi dan informatika
3	Misi 3 : Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan (ekuitabilitas)	Beberapa wilayah Kabupaten/Kota masih kurang sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika	Alokasi anggaran APBD masih minim	Perlu kerjasama antar Kabupaten/Kota mengenai satu kesisteman transportasi, komunikasi dan informatika
4	Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana (sustainabilitas)	Kerjasama antar SKPD dalam forum SKPD perlu ditingkatkan lagi (penyelenggaraan transportasi bersinergi dengan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana)	Alokasi anggaran APBD masih minim	Perlu dukungan APBN atau peran BUMN atau swasta murni dalam bentuk KPS

III.3 Telaaha Renstra K/L dan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis SKPD diharapkan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bahan komparasi capaian sasaran dalam Renstra SKPD. Sehingga dengan adanya keselarasan akan tercapai sinergi dan satu kesatuan kesisteman transportasi dari mulai Sislognas, Sistranas, Tatranas, Tatrabil dan Tatrakom.

Tabel III.2  
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap  
Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

Urusan Perhubungan :				
No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Angka kecelakaan	Tahun ke-5 lebih kecil dari 10 %	Rata-rata tahun ke-5 lebih kecil dari 15%	Mendekati zero accident
2	Jumlah rute pelayanan transportasi	Tahun ke-5 jumlah rute pelayanan transportasi bertambah 2 rute	Rata-rata tahun ke-5 bertambah 1 rute	Rute pelayanan transportasi menjangkau sampai ke daerah terpencil
3	Jumlah prasarana transportasi	Tahun ke-5 terbangun 1 prasarana transportasi	Rata-rata tahun ke-5 terbangun 1 prasarana transportasi	Prasarana transportasi terbangun sesuai dengan koridor MP3EI

Urusan Komunikasi dan Informatika :				
No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Prosentase pengguna yang mengakses internet gratis	Tahun ke-5 mencapai 75 %	-	Pelayanan internet gratis sampai wilayah kecamatan
2	Prosentase desa yang memanfaatkan program USO	Tahun ke-5 desa yang memanfaatkan program USO 50%	-	Pemanfaatan program USO 100%
3	Jumlah kerjasama dengan media massa	Tahun ke-5 jumlah kerjasama media massa 1 kerjasama	Rata-rata tahun ke-5 jumlah kerjasama media massa 1 kerjasama	Terjalin kerjasama dengan seluruh media massa dalam rangka penyebaran informasi

III.4 Telaaha Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel III.3  
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta  
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Urusan Perhubungan :				
No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Rencana Sistem Perkotaan	Penataan kawasan transportasi perkotaan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	Kerjasama dan koordinasi dengan kabupaten/ kota
2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi	Cakupan jaringan pelayanan transportasi belum terintegrasi	Wilayah yang cukup luas dan tersebar	Kerjasama dan koordinasi dengan kabupaten/ kota

Urusan Komunikasi dan Informatika :				
No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	Kewenangan penyelenggaraan komunikasi dan informatika masih terpusat	Alokasi APBN pelaksanaan dekonsentrasi belum maksimal	Kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta

Tabel III.4  
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pencemaran Air dan Udara (emisi GRK)	Belum terbangunnya sistem control emisi udara akibat penyelenggaraan transportasi	Alokasi anggaran terbatas	Kerjasama dan koordinasi dengan BLH
2	Erosi, sedimentasi dan lahan kritis	Pembangunan prasarana transportasi harus menjaga keberlangsungan lingkungan	Alokasi anggaran terbatas	Pengawasan aparat

Tabel III.5  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Urusan Perhubungan :					
No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Rencana Sistem Perkotaan	Manajemen dan rekayasa lalu lintas wilayah perkotaan	Program Perencanaan Tata Ruang	Terbentuk kawasan tertib lalu lintas di masing-masing ibukota kabupaten	Lokasi persimpangan yang menimbulkan traffic jam
2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi	Jaringan transportasi menjadi satu kesatuan antar kabupaten/kota	Program Perencanaan Tata Ruang	Supply and demand transportasi	Pembukaan rute baru pelayanan transportasi
				Jaringan prasarana angkutan jalan	Lokasi terminal
				Jaringan pelayanan SDP	Lokasi dermaga sungai, danau dan penyeberangan
				Jaringan transportasi perkotaan	Lokasi penempatan halte
				Jaringan angkutan kereta api	Pembangunan jalur ganda kereta api
				Jaringan transportasi udara	Lokasi bandara
				Jaringan transportasi laut	Lokasi pelabuhan

Urusan Komunikasi dan Informatika :					
No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	Belum tertatanya pemanfaat tower bersama telekomunikasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan tower bersama telekomunikasi	Lokasi strategis dalam wilayah kota kabupaten
		Pengembangan prasarana telekomunikasi	Program Perencanaan Tata Ruang	Melayani 80% sambungan telepon wilayah perkotaan dan 30% wilayah pedesaan	Lokasi strategis dalam wilayah kota kabupaten
				Pengembangan TIK untuk mendukung e-Government	Lingkup SKPD Provinsi

Tabel III.6  
 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS  
 Provinsi Sumatera Selatan  
 SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pembukaan jaringan transportasi mengurangi ruang terbuka hijau	Pembangunan simpul transportasi terminal, dermaga dan bandara	Program kegiatan pembangunan prasarana transportasi memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pencemaran Air dan Kualitas Udara	Pengawasan terhadap CO2 emisi gas buang kendaraan	Program kegiatan pembangunan transportasi harus memperhatikan dampak terhadap kualitas air dan udara
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengurangan emisi GRK	Mengoptimalkan fungsi balai uji kelayakan kendaraan	Program kegiatan diarahkan mendukung pengurangan emisi kendaraan
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Alih fungsi lahan untuk pembangunan yang berkelanjutan	Land use transport mengarah kepada kinerja jaringan transportasi	Program kegiatan pembangunan diarahkan menjaga keberlangsungan lingkungan
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pencemaran Air dan Kualitas Udara	Pengawasan terhadap CO2 emisi gas buang kendaraan	Program kegiatan pembangunan transportasi harus memperhatikan dampak terhadap kualitas air dan udara
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Erosi, sedimentasi dan lahan kritis	Pembangunan prasarana di daerah perairan daratan	Program kegiatan diarahkan ke lokasi yang aman dari bahaya erosi, sedimentasi dan lahan kritis

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel III.7  
Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel III.8  
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Kecelakaan Lalu Lintas	20	10	20	5	10	10	75
2	Jaringan Pelayanan Transportasi	15	10	20	10	15	5	75
3	Pelayanan Simpul Transportasi	15	10	15	10	15	15	80
4	Kemacetan Lalu Lintas Lingkup Perkotaan	20	10	20	10	15	10	85
5	Kinerja Prasarana Transportasi	10	10	15	10	10	10	65
6	Blank Spot Area	20	10	15	10	10	10	75
7	Jangkauan Layanan Pos	15	10	15	5	15	5	65
8	Teknologi Informasi Komunikasi	20	10	15	10	10	10	75
9	Kerjasama Informasi dan Media Massa	15	10	15	10	10	10	70

Tabel III.9  
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kecelakaan Lalu Lintas	75	12,500
2	Jaringan Pelayanan Transportasi	75	12,500
3	Pelayanan Simpul Transportasi	80	13,333
4	Kemacetan Lalu Lintas Lingkup Perkotaan	85	14,167
5	Kinerja Prasarana Transportasi	65	10,833
6	Blank Spot Area	75	12,500
7	Jangkauan Layanan Pos	65	10,833
8	Teknologi Informasi Komunikasi	75	12,500
9	Kerjasama Informasi dan Media Massa	70	11,667

Tabel III.10  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Sumatera Selatan

Urusan Perhubungan :					
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kecelakaan lalu lintas	Angka kecelakaan masih tinggi	SPM Bidang Perhubungan	Fasilitas keselamatan LLAJ masih minim	Kondisi jalan yang belum mantap	Alokasi anggaran yang minim
			Uji laik jalan kendaraan belum optimal		Perlu koordinasi dengan pihak Kabupaten/Kota
			Pengawasan kelebihan muatan belum optimal		
			SDM pengemudi perlu pembinaan		
Jaringan pelayanan transportasi	Belum menyentuh ke daerah terpencil	Ketersediaan prasarana transportasi	Wilayah yang cukup luas dan tersebar		Pembagian urusan perhubungan telah diserahkan ke kabupaten/kota
			Pembukaan rute pelayanan transportasi perlu subsidi		Alokasi anggaran masih kecil
Pelayanan simpul transportasi	Belum tercapai SPM Pelayanan karena minim fasilitas	SPM Pelayanan masing-masing sektor	Kinerja SDM perlu ditingkatkan		Perlu pengawasan terhadap peaksanaan kinerja SPM
Kemacetan lalu lintas lingkup perkotaan	Pertambahan panjang jalan lebih lambat dari pertambahan jumlah kendaraan	Ukuran kinerja jalan	Alokasi anggaran cukup besar membangun infrastruktur transportasi	Perlu kerjasama dengan pihak swasta	Perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan Pusat
Kinerja prasarana transportasi	Kinerja prasarana transportasi belum optimal	Ukuran indeks kepuasan masyarakat	Alokasi anggaran yang minim		Alokasi anggaran yang minim

Tabel III.11  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Sumatera Selatan

Urusan Komunikasi dan Informatika :					
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Blank Spot Area	Jaringan telekomunikasi masih terpusat di kota kabupaten	Survey lapangan	Cakupan wilayah yang cukup luas		Alokasi anggaran yang minim



Urusan Komunikasi dan Informatika :					
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Jangkauan layanan pos	Jangkauan layanan pos masih terpusat di kota kabupaten	Ukuran kinerja pos	Penyelenggaraan pos telah diserahkan kepada pihak pos		Perlu kerjasama dan koordinasi dengan pihak pos
Teknologi Informasi Komunikasi	Belum terbangun	Survey lapangan	Alokasi anggaran yang minim	Perlu kerjasama dengan swasta	Alokasi anggaran yang minim
Kerjasama informasi dan media massa	Sudah terjalin namun kinerja belum optimal	Hubungan kerja dengan media	Alokasi anggaran yang minim		Alokasi anggaran yang minim

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

IV.1 Visi dan Misi SKPD

Tabel IV.1  
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Adanya Kesisteman Terintegrasi	Transportasi, komunikasi dan informatika	Terwujudnya Sistem Transportasi, Komunikasi dan Informatika Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Sumatera Selatan Yang Berkelanjutan
2	Adanya Kehandalan Untuk Mewujudkan	Langkah konkret untuk melaksanakan	
3	Adanya Tujuan Yang Hendak Dicapai	Pembangunan transportasi, komunikasi dan informatika	

Tabel IV.2  
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Sistem Transportasi, Komunikasi dan Informatika Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Sumatera Selatan Yang Berkelanjutan	Transportasi, komunikasi dan informatika	Sistem transportasi harus terintegrasi
		Jaringan komunikasi dan informatika harus terintegrasi
	Langkah konkret untuk melaksanakan	Terwujudnya sistem transportasi, komunikasi dan informatika yang handal
	Pembangunan transportasi, komunikasi dan informatika	Tujuan pembangunan harus terintegrasi dan berkelanjutan

Visi SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Sistem Transportasi, Komunikasi dan Informatika Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Sumatera Selatan Yang Berkelanjutan”**

Tabel IV.3  
Perumusan Misi

No .	Visi	Pokok - pokok visi	Stakeholder layanan								Misi
			SKPD lain		Pengguna layanan		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
	Terwujudnya Sistem Transportasi, Komunikasi dan Informatika Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Sumatera Selatan Yang Berkelanjutan		(√)	Rincian misi	(x)	-	(√)	Rincian misi	(√)	Rincian misi	
			(√)	Profesional dalam kerjasama antar SKPD	(√)	SDM harus profesional dalam melayani pengguna	(√)	Pengurusan izin bagi pelaku ekonomi harus profesional	(x)	-	Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
			(√)	Kinerja SKPD lain diperlukan	(√)	Tercapainya SPM	(√)	Tercapainya SPM	(x)	-	Mengoptimalkan fungsi simpul transportasi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara)
			(x)	-	(√)	Tercapainya SPM	(√)	Tercapainya SPM	(x)	-	Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			(√)	Kinerja SKPD lain diperlukan	(√)	Tersedianya sarana dan prasarana	(√)	Tersedianya sarana dan prasarana	(x)	-	Meningkatkan fungsi pelayanan sarana dan prasarana Perhubungan Komunikasi dan Informatika
			(x)	-	(√)	Belum tercapainya SPM angkutan umum	(√)	Belum tercapainya SPM angkutan umum	(x)	-	Mengembangkan sistem angkutan yang berbasis angkutan massal

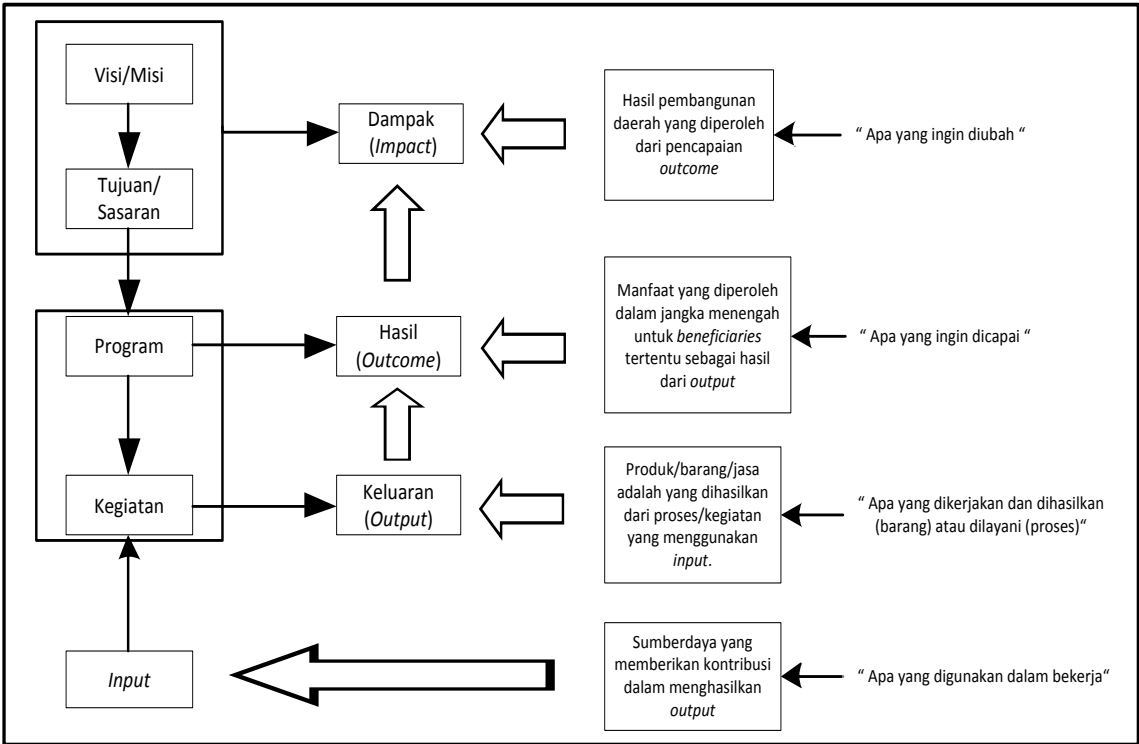
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka diperlukan beberapa misi antara lain :

1. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
2. Mengoptimalkan fungsi simpul transportasi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara);
3. Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
4. Meningkatkan fungsi pelayanan sarana dan prasarana Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
5. Mengembangkan sistem angkutan yang berbasis angkutan massal.

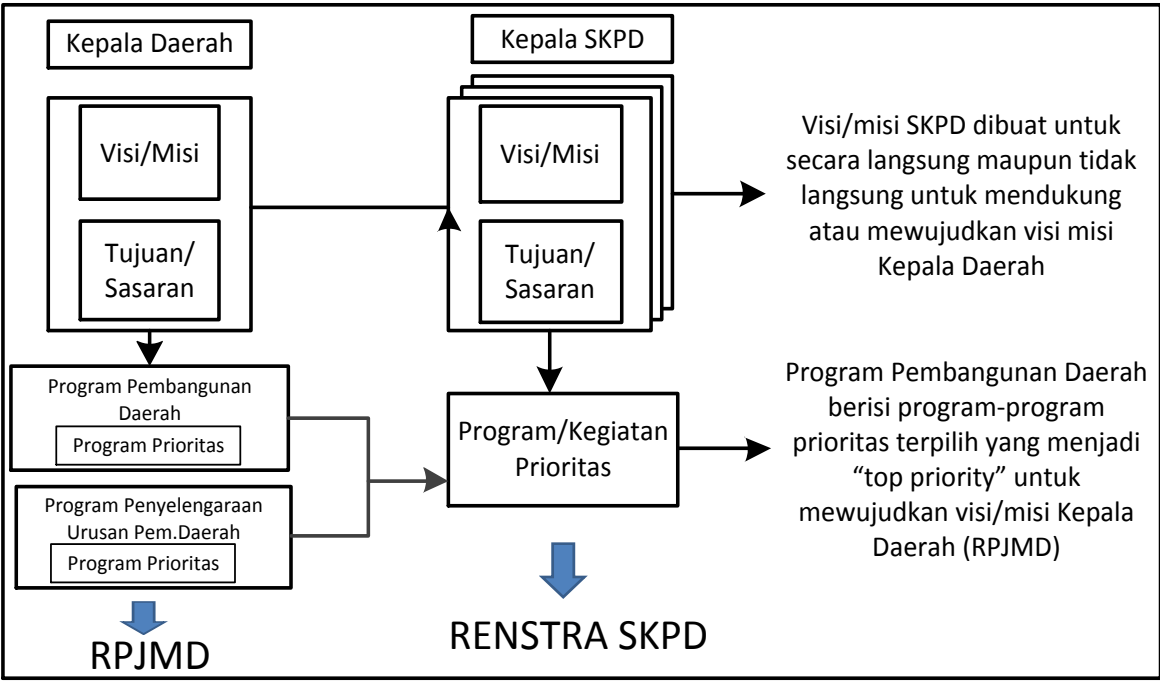
Tabel IV.4  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang dan penumpang	Peningkatan jaringan pelayanan transportasi	Jumlah rute pelayanan transportasi	2 rute pelayanan	2 rute pelayanan	2 rute pelayanan	2 rute pelayanan	2 rute pelayanan
		Peningkatan prasarana transportasi	Jumlah prasarana transportasi	1 prasarana terbangun	1 prasarana terbangun	1 prasarana terbangun	1 prasarana terbangun	1 prasarana terbangun
2	Terwujudnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Mendekati angka zero accident	< 22% kejadian laka lintas	< 19% kejadian laka lintas	< 15% kejadian laka lintas	< 13% kejadian laka lintas	< 10% kejadian laka lintas
3	Terwujudnya penyebaran layanan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan jaringan pelayanan internet gratis	Prosentase pengguna yang mengakses internet gratis	50%	60%	65%	70%	75%
		Peningkatan desa yang memanfaatkan USO	Jumlah desa yang terbangun USO	30%	34%	38%	42%	45%
		Peningkatan kerjasama media massa	Jumlah kerjasama dengan media massa	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama
4	Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Prosentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	70%	75%	80%	85%	90%
5	Terwujudnya pegawai yang berkompentensi teknis bidang Perhubungan dan Kominfo	Meningkatnya kompetensi pegawai	Jumlah pegawai yang mempunyai kompetensi tinggi bidang Perhubungan dan Kominfo	30 pegawai	50 pegawai	70 pegawai	80 pegawai	100 pegawai

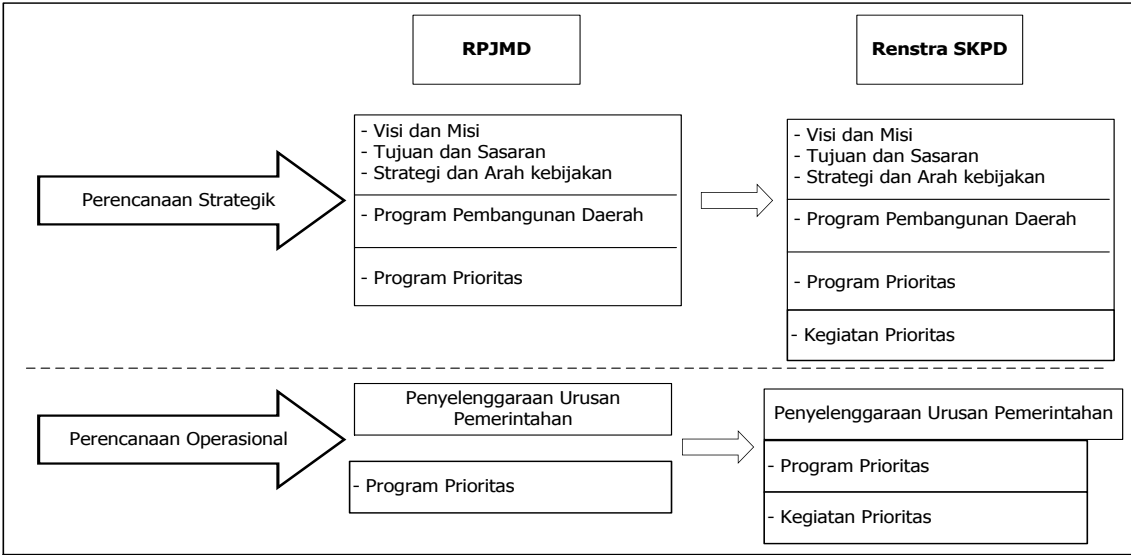
Gambar IV.1  
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Gambar IV.2  
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Gambar IV.3  
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD



IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang dan penumpang;
2. Terwujudnya keselamatan transportasi;
3. Terwujudnya penyebaran layanan informasi dan komunikasi publik;
4. Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi;

5. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi teknis bidang Perhubungan dan Kominfo.

Tabel IV.5  
Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Peningkatan jaringan pelayanan transportasi	- Jumlah rute pelayanan transportasi	Pembukaan rute pelayanan transportasi
2.	Peningkatan prasarana transportasi	- Jumlah prasarana transportasi	Pembangunan prasarana transportasi
3.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	- Mendekati angka zero accident	- Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi - Menurunkan pelanggaran kelebihan muatan - Pembangunan SDM awak pengemudi
4.	Peningkatan jaringan pelayanan internet gratis	- Prosentase pengguna yang mengakses internet gratis	- Pembangunan TIK dan Sumatera Selatan free Wifi Area
5.	Peningkatan desa yang memanfaatkan Universal Service Obligation (USO)	- Jumlah desa yang terbangun USO	- Pembangunan prasarana USO
6.	Peningkatan kerjasama informasi	- Jumlah kerjasama informasi	- Pembangunan jaringan kerjasama

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah pelayanan SKPD maka diperlukan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan pertama;  
Untuk mewujudkan tujuan pertama yaitu "Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang dan penumpang" dengan sasaran pertama yaitu :
  - a. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi;
  - b. Peningkatan prasarana transportasi;
2. Tujuan kedua;  
Untuk mewujudkan tujuan kedua yaitu "Terwujudnya keselamatan transportasi" dengan sasaran kedua yaitu : menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.
3. Tujuan ketiga;  
Untuk mewujudkan tujuan ketiga yaitu "Terwujudnya penyebarluasan layanan informasi dan komunikasi publik" dengan sasaran ketiga yaitu :
  - a. Peningkatan jaringan pelayanan internet gratis;

- b. Peningkatan desa yang memanfaatkan Universal Service Obligation (USO) atau layanan desa berdering;
  - c. Peningkatan kerjasama dengan media massa
4. Tujuan keempat;
- Untuk mewujudkan tujuan keempat yaitu " Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi" dengan sasaran keempat yaitu : meningkatnya layanan administrasi perkantoran.
5. Tujuan kelima;
- Untuk mewujudkan tujuan kelima yaitu "Terwujudnya pegawai yang berkompetensi teknis bidang Perhubungan dan Kominfo" dengan sasaran kelima yaitu : meningkatnya kompetensi pegawai.

#### IV.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Adapun strategi dan kebijakan SKPD untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran pertama;
- Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pertama diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi
    - 1) Peningkatan jaringan pelayanan transportasi darat
    - 2) Peningkatan jaringan pelayanan transportasi kereta api
    - 3) Peningkatan jaringan pelayanan transportasi sungai
    - 4) Peningkatan jaringan pelayanan transportasi penyeberangan
    - 5) Peningkatan jaringan pelayanan transportasi laut
    - 6) Peningkatan jaringan pelayanan transportasi udara
  - b. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi
    - 1) Peningkatan pelayanan prasarana transportasi darat
    - 2) Peningkatan pelayanan prasarana transportasi kereta api
    - 3) Peningkatan pelayanan prasarana transportasi sungai
    - 4) Peningkatan pelayanan prasarana transportasi penyeberangan
    - 5) Peningkatan pelayanan prasarana transportasi laut
    - 6) Peningkatan pelayanan prasarana transportasi udara
2. Sasaran kedua;
- Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kedua diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :
  - a. Pemenuhan terhadap fasilitas keselamatan LLAJ;
  - b. Pemberlakuan denda kelebihan muatan;
  - c. Pemberlakuan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor

3. Sasaran ketiga;

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran ketiga diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan jaringan pelayanan internet gratis;
  - 1) Layanan internet gratis di tempat umum
  - 2) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- b. Peningkatan desa yang memanfaatkan USO;
  - 1) Revitalisasi jasa layanan pos
  - 2) Pengembangan layanan USO
- c. Peningkatan kerjasama dengan media massa



Tabel IV.6  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sistem Transportasi, Komunikasi dan Informatika Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Sumatera Selatan Yang Berkelanjutan			
MISI I : Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pegawai yang berkompetensi teknis bidang Perhubungan dan Kominfo	Meningkatnya kompetensi pegawai	Pembangunan SDM Perhubungan dan Kominfo	1. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntable dan berkinerja tinggi	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 3. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
MISI II : Mengoptimalkan fungsi simpul transportasi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang dan penumpang	1. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi	1. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi darat 2. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi kereta api 3. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi sungai 4. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi penyeberangan 5. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi laut 6. Peningkatan jaringan pelayanan transportasi udara	1. Program Pengembangan LLAJ 2. Program Pengembangan LLASDP 3. Program Pengembangan Transportasi Perkotaan 4. Program Pengembangan Transportasi Udara 5. Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading) 6. Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut 7. Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api 8. Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor
	2. Peningkatan prasarana transportasi	1. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi darat 2. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi kereta api 3. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi sungai 4. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi penyeberangan 5. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi laut 6. Peningkatan pelayanan prasarana transportasi udara	1. Program Pengembangan LLAJ 2. Program Pengembangan LLASDP 3. Program Pengembangan Transportasi Perkotaan 4. Program Pengembangan Transportasi Udara 5. Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading) 6. Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut 7. Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api 8. Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor
MISI III : Meningkatkan fungsi pelayanan sarana dan prasarana Perhubungan Komunikasi dan Informatika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1. Pemenuhan fasilitas keselamatan LLAJ 2. Pemberlakuan denda kelebihan muatan 3. Pemberlakuan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor	1. Program Pengembangan LLAJ 2. Program Pengembangan Transportasi Perkotaan 3. Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading) 4. Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Kereta Api 5. Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor

VISI : Terwujudnya Sistem Transportasi, Komunikasi dan Informatika Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Sumatera Selatan Yang Berkelanjutan			
MISI IV : Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyebaran layanan informasi dan komunikasi publik	1. Peningkatan jaringan pelayanan internet gratis	1. Layanan internet gratis di tempat umum 2. Pengembangan TIK	1. Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi 2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 3. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
	2. Peningkatan desa yang memanfaatkan USO	1. Revitalisasi jasa layanan pos 2. Pengembangan layanan USO	1. Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi 2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 3. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
	3. Peningkatan kerjasama media massa	3. Penataan kerjasama dengan media massa	1. Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi 2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 3. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
MISI V : Mengembangkan sistem angkutan yang berbasis angkutan massal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya angkutan massal yang berteknologi tinggi dan berdaya saing internasional	Peningkatan pelayanan angkutan menuju standar pelayanan prima lingkup wilayah perkotaan	Pembangunan angkutan massal berteknologi tinggi dan berdaya saing internasional	Program kerjasama Pemerintah dan Swasta

BAB V  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
SKPD DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	% kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%													Dishub	
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat		600 srt	40 jt	782 srt	50 jt	833 srt	55 jt	909	60 jt	1000 srt	66 jt			
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan		12 bln	640 jt	12 bln	900 jt	12 bln	976 jt	12 bln	1 M	12 bln	1,1 M			
				c Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 unit		1 unit	10 jt	1 unit	10 jt	1 unit	20 jt	1 unit	20 jt	1 unit	20 jt			
				d Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	57 R4 & R2		57 unit	800 jt	57 unit	850 jt	57 unit	900 jt	57 unit	950 jt	57 unit	1 M			
				e Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30 orang		30 org	144 jt	30 org	138 jt	30 org	150 jt	30 org	160 jt	30 org	170 jt			
				f Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bid/UPTD		12 bln	471 jt	12 bln	500 jt	12 bln	550 jt	12 bln	600 jt	12 bln	650 jt			
				g Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bid/UPTD		12 bln	405 jt	12 bln	650 jt	12 bln	700 jt	12 bln	750 jt	12 bln	800 jt			
				h Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400 titik		400 ttk	40 jt	450 ttk	40 jt	450 ttk	50 jt	450 ttk	50 jt	450 ttk	60 jt			
				i Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bid/UPTD		12 bln	30 jt	12 bln	30 jt	12 bln	35 jt	12 bln	40 jt	12 bln	45 jt			
				j Penyediaan Makanan dan Minuman	100 kali		12 bln	60 jt	12 bln	100 jt	12 bln	120 jt	12 bln	120 jt	12 bln	125 jt			
				k Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	250 kali		12 bln	2,8 M	12 bln	2,3 M	12 bln	2,6 M	12 bln	3 M	12 bln	3,2 M			
				l Penyediaan Jasa Tutor SKJ	1 orang		1 org	6,6 jt	1 org	13,2 jt	1 org	13,2 jt	1 org	15 jt	1 org	15 jt			
				m Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	30 keg		30 keg	30 jt	30 keg	30 jt	30 keg	40 jt	30 keg	40 jt	30 keg	50 jt			
				n Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	108 org		108 org	2,3 M	108 org	2,5 M	108 org	2,5 M	108 org	2,6 M	108 org	2,6 M			
				o Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	20 ruangan		20 rua	40 jt	20 rua	40 jt	20 rua	50 jt	20 rua	50 jt	20 rua	50 jt			
				p Pengadaan dan Pemasangan Listrik	66.000 KVA		66 rb	100 jt	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85%														
				a Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 keg		1 keg	600 jt	1 keg	400 jt	1 keg	600 jt	1 keg	650 jt	1 keg	800 jt			
				b Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 gedung		3 gdng	800 jt	3 gdng	500 jt	3 gdng	600 jt	3 gdng	900 jt	3 gdng	900 jt			
				c Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis		5 jns	135 jt	5 jns	100 jt	5 jns	135 jt	5 jns	135 jt	5 jns	135 jt			
				d Pemeliharaan Taman dan Parkir Kantor	1 taman & park		1 tmn & park	350 jt	1 tmn & park	350 jt	1 tmn & park	350 jt	1 tmn & park	350 jt	1 tmn & park	350 jt			
				e Pembangunan Gedung Kantor UPTD	1 unit		1 unit	950 jt	-	-	-	-	-	-	-	-			
				f Pembangunan Mess Pegawai UPTD BPLJKB	1 unit		1 unit	400 jt	1 unit	400 jt	-	-	-	-	-	-			
				g Pengadaan Lemari Arsip	50 unit		50 unit	40 jt	50 unit	50 jt	50 unit	50 jt	50 unit	50 jt	-	-			
				h Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	290 pegawai		290 org	289,8 jt	268 org	200 jt	-	-	-	-	275 org	280 jt			
				i Pengadaan Name Tag Pegawai	290 pegawai		290 org	36,8 jt	-	-	-	-	-	-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]		
Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang dan penumpang	Peningkatan jaringan pelayanan transportasi	Jumlah rute pelayanan transportasi		1 Program Pengembangan LLAJ	100rb pnp/thn																
				a Pembukaan rute trayek baru AKDP :																	
				- Muara Enim - Pangkalan Balai	1 trayek	LF : 0%	-	-	12 bln	500jt	12 bln	500jt							LF : > 70%	Dishub	
				- Muara Enim - Sekayu - Mangun Jaya	1 trayek	LF : 0%	-	-	12 bln	500jt	12 bln	500jt							LF : > 70%	Dishub	
				- Pagar Gunung - OKI	1 trayek	LF : 0%	-	-	-	-	12 bln	500jt	12 bln	500jt	12 bln	500jt	12 bln	500jt	LF : > 70%	Dishub	
				- Penetrasi angkutan perintis pada daerah terpencil	1 trayek	LF : 0%	-	-	-	-	-	-	12 bln	500jt	12 bln	500jt	12 bln	500jt	LF : > 70%	Dishub	
				- Pembukaan rute baru angkutan pemandu moda menuju Bandara dan Pelabuhan TAA	1 trayek	LF : 0%	-	-	12 bln	500jt	12 bln	500jt	-	-	-	-	-	-	LF : > 70%	Dishub	
				2 Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut																	
				a Study Pengembangan Jaringan Transportasi Penyeberangan dari dan menuju TAA	1 dokumen		-	-	1 dok	500jt	-	-	-	-	-	-	-	-		Dishub	
				3 Program Pengembangan LLASDP dan Laut																	
a Study Potensi Jaringan Angkutan Sungai di Wilayah Captive Area	1 dokumen															Dishub					
b Study Potensi Jaringan Transportasi Laut dari dan menuju Pelabuhan Laut TAA												1 dok	500jt			Dishub					
c Study Potensi Jaringan Transportasi Laut dari dan menuju Rencana Pelabuhan Laut Tanjung Carat														1 dok	500jt		Dishub				
4 Program Pengembangan Transportasi Udara																					
a Study Pengembangan dan Rencana Pembukaan Penerbangan Perintis Dalam Wilayah Sumatera Selatan	1 dokumen									1 dok	500jt						Dishub				
b Subsidi Penerbangan Silampari - SMB II							1 lts	1 M	1 lts	1 M	1 lts	1 M	1 lts	1 M	1 lts	1 M		Dishub			
c Subsidi Penerbangan Atung Bungsu - SMB II									1 lts	1 M	1 lts	1 M	1 lts	1 M	1 lts	1 M		Dishub			
5 Program Pengembangan Transportasi Perkotaan																					
a Study Pengembangan Jaringan Transportasi Dalam Kota	1 dokumen									1 dok	300jt	1 dok	300jt	1 dok	300jt	1 dok	300jt		Dishub		
b Study Pengembangan Jaringan Transportasi Multimoda Dalam Perkotaan	1 dokumen									1 dok	300jt	1 dok	300jt	1 dok	300jt	1 dok	300jt		Dishub		
		Jumlah prasarana transportasi		1 Program Pengembangan LLAJ																	
				a Pembangunan Terminal Type B Kabupaten Empat Lawang						1 dok	5 M	1 dok	5 M	1 dok	5 M			Dishub			
				b Pembangunan Terminal Type B Kabupaten Lahat						1 pkt	6 M	1 pkt	6 M	1 pkt	6 M			Dishub			
				c Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan						1 pkt	6 M	1 pkt	6 M	1 pkt	6 M	1 pkt	6 M	Dishub			









Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungj awab	Lokasi
							Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]

				h Pembuatan Dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandara Silampari	1 dokumen		-	-	-	-	1 dok	650 jt	-	-	-	-		Dishub	
				i Pembuatan Rencana Induk Lapangan Terbang di Sumatera Selatan	1 dokumen		-	-	-	-	1 dok	950 jt	-	-	-	-		Dishub	
				j Penyusunan Kajian Strategis Transportasi Udara di Wilayah Sumatera Selatan	1 dokumen		-	-	-	-	1 dok	1,5 M	-	-	-	-		Dishub	
				k Pengendalian dan Pengawasan KKOP	12 bulan		-	-	12 bln	150 jt	12 bln	150 jt	12 bln	150 jt	12 bln	150 jt		Dishub	
				l Penerbitan dan Perpanjangan License Petugas HLO dan ATC/ATS	8 orang		-	-	8 org	150 jt	-	-	-	-	-	-		Dishub	
				m Pengadaan dan Pemasangan AMSC Bandara Silampari	1 unit		-	-	-	-	1 unit	4,3 M	-	-	-	-		Dishub	
				n Pembukaan Rute Penerbangan Palembang - Malaka Malaysia	1 pkt		-	-	-	-	1 pkt	3 M	1 pkt	3 M	1 pkt	3 M		Dishub	
				o Revitalisasi Bandara di Sumatera Selatan	3 bandara		-	-	-	-	1 bndra	3,5 M	1 bndra	3,5 M	1 bndra	3,5 M		Dishub	
				p Pembinaan dan Pengawasan Pengoperasian Bandar Udara	4 bandara		-	-	4 bndra	75 jt	4 bndra	75 jt	4 bndra	75 jt	4 bndra	75 jt		Dishub	
				7 Program Pengembangan Transportasi Perkotaan															
				a Pembangunan ATCS			1 pkt	1 M	1 pkt	1 M	1 pkt	1 M						Dishub	
				b Pengadaan Traffic Block			1 pkt	500jt	1 pkt	380 jt	1 pkt	500jt	1 pkt	500jt	1 pkt	500jt		Dishub	
				c Pengadaan Traffic Cone			1 pkt	300jt	1 pkt	200 jt	1 pkt	300jt	1 pkt	300jt	1 pkt	300jt		Dishub	
				d Dukungan Pengembangan Transmusi			1 pkt	1 M	1 pkt	1 M	1 pkt	1 M	1 pkt	1 M	1 pkt	1 M		Dishub	
				e Sosialisasi Keselamatan LLAJ	2000 orang		1 rb og	134 jt	2 rb og	500 jt	2 rb og	500 jt	2 rb og	500 jt	2 rb og	500 jt		Dishub	
				f Bintek Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum	40 orang		40 org	150 jt	40 org	150 jt	40 org	150 jt	40 org	150 jt	40 org	150 jt		Dishub	
				g Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	30 orang		30 org	134 jt	30 org	200 jt	30 org	200 jt	30 org	200 jt	30 org	200 jt		Dishub	
				h Lomba Tertib Lalu Lintas	4 piala		4 piala	98 jt	4 piala	235 jt	4 piala	250 jt	4 piala	250 jt	4 piala	250 jt		Dishub	
				i Study Daerah Rawan Kecelakaan	1 dokumen		1 dok	215 jt	1 dok	300 jt	1 dok	300 jt	1 dok	300 jt	1 dok	300 jt		Dishub	
				j Bintek Audit Keselamatan Jalan	30 orang		30 org	59 jt	30 org	130 jt	30 org	130 jt	30 org	130 jt	30 org	130 jt		Dishub	
				k Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan	1 dokumen		1 dok	274 jt	1 dok	300 jt	1 dok	300 jt	1 dok	300 jt	1 dok	300 jt		Dishub	
				l Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Monitoring Emisi Udara	1 unit		-	-	1 unit	1,03 M	1 unit	1,5 M	1 unit	1,5 M	-	-		Dishub	
				m Pengadaan SIM Keselamatan dan Jaringan	1 SIM		-	-	1 SIM	100 jt	-	-	-	-	-	-		Dishub	
				n Rencana Aksi Keselamatan Berlalu Lintas	1250 orang		-	-	1,2 org	615 jt	1,2 org	615 jt	1,2 org	615 jt	1,2 org	615 jt		Dishub	
				o Rehab Berat Halte Angkutan Umum	1 unit		-	-	1 unit	75 jt	-	-	-	-	-	-		Dishub	
				8 Program Pengembangan Transportasi Multi Moda															
				a Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda Sungai Sebalik			-	-	-	-	1 pkt	5 M	1 pkt	5 M	1 pkt	5 M		Dishub	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungj awab	Lokasi
							Tahun-1 (2014)		Tahun-2 (2015)		Tahun-3 (2016)		Tahun-4 (2017)		Tahun-5 (2018)				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]

Terwujudnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Mendekati angka zero accident		1 Program Pengembangan LLAJ			1 pkt	1,5 M	1 pkt	1,5 M	1 pkt	1,5 M	1 pkt	1,5 M	1 pkt	1,5 M			
				a Pelaksanaan Pengawasan, Penertiban dan Perizinan Kendaraan Bermotor			1 pkt	200jt	1 pkt	200jt	1 pkt	200jt	1 pkt	200jt	1 pkt	200jt			Dishub
				b Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan															Dishub
				2 Program Pengembangan LLASDP dan Laut			1 pkt	100jt	1 pkt	75 jt	1 pkt	100jt	1 pkt	100jt	1 pkt	100jt			Dishub
				a Razia Kapal Pedalaman Sungai															
				3 Program Penanggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading)															
				a Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT)	5 PPT		1 pkt	2 M	1 pkt	1,6 M	1 pkt	2,5 M	1 pkt	2,5 M	1 pkt	2,5 M			Dishub
				b Pembangunan Jalan Keluar/Masuk PPT	1 PPT		1 PPT	950 jt	1 PPT	850 jt	1 PPT	1 M	1 PPT	1 M	1 PPT	1 M			Dishub
				c Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Penggantian Suku Cadang	5 timbangan		5 tmb	568 jt	5 tmb	600 jt	5 tmb	600 jt	5 tmb	600 jt	5 tmb	600 jt			Dishub
				d Pembangunan Sarana dan Prasarana PPT	5 PPT		-	-	-	-	5 PPT	3 M	5 PPT	2 M	5 PPT	2 M			Dishub
				e Rehabilitasi Prasarana Pos Pemeriksaan Terpadu	1 PPT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dishub
				f Pembangunan Sistem Monitoring dan Penegakan Hukum Elektronik di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT)	5 PPT		-	-	5 PPT	1,3 M	-	-	-	-	-	-			Dishub
				g Pembangunan Pelataran Parkir Pos Pemeriksaan	1 PPT		-	-	1 PPT	800 jt	1 PPT	1 M	1 PPT	1 M	1 PPT	1 M			Dishub
				4 Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor															
				a Pelaksanaan Uji Laik Jalan Kendaraan Bermotor			-	-	-	-	1 pkt	2 M	1 pkt	2 M	1 pkt	2 M			Dishub
				b Pengelolaan dan Penyelenggaraan UPTD BPLJKB	1 unit		1 unit	1,94 M	1 unit	1,6 M	1 unit	2 M	1 unit	2 M	1 unit	2 M			Dishub
				c Pemeliharaan Alat Pengujian	11 unit		11 unit	150 jt	11 unit	110 jt	11 unit	200 jt	11 unit	200 jt	11 unit	200 jt			Dishub
				d Sosialisasi Bengkel Konstruksi/Karoseri Kendaraan Bermotor se Sumsel	40 orang		40 org	110 jt	50 org	110 jt	50 org	150 jt	50 org	150 jt	50 org	150 jt			Dishub
				e Pengadaan Peralatan Smoke Tester	1 unit		1 unit	200 jt	-	-	-	-	-	-	-	-			Dishub
				f Pembangunan Rumah Jaga Balai Pengujian	1 unit		-	-	1 unit	110 jt	-	-	-	-	-	-			Dishub
Terwujudnya penyebaran layanan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan jaringan pelayanan internet gratis	Jumlah pengguna yang mengakses internet gratis		1 Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi			-	-	1 pkt	4 M	1 pkt	4 M	1 pkt	4 M	1 pkt	4 M			
				a Pengembangan TIK			1 pkt	4 M	1 pkt	3,8 M	1 pkt	4 M	1 pkt	4 M	1 pkt	4 M			Dishub
				b Sumatera Selatan Free Wi-Fi Area	17 kab/kota		1 pkt	200jt	1 pkt	200jt	1 pkt	200jt	1 pkt	200jt	1 pkt	200jt			Dishub
				c Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelayanan Website Pemprov. Sumsel	3 website														Dishub
				d Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	50 SKPD		1 pkt	4 M	1 pkt	2,5 M	1 pkt	3 M	1 pkt	3 M	1 pkt	3 M			Dishub
				e Pemingkatan E-Government se Sumatera Selatan	17 kab/kota		kab/kta	100 jt	kab/kta	100 jt	kab/kta	100 jt	kab/kta	100 jt	kab/kta	100 jt			Dishub
				f Pengadaan Peralatan Presentasi	1 unit		1 unit	200 jt	-	-	-	-	-	-	-	-			Dishub
				g Pembinaan Dewan TIK Daerah	100 orang		100 org	100 jt	100 org	100 jt	100 org	100 jt	100 org	100 jt	100 org	100 jt			Dishub
				h Pembinaan Pranata Komputer	100 orang		100 org	100 jt	100 org	100 jt	100 org	100 jt	100 org	100 jt	100 org	100 jt			Dishub
				i Pengembangan Data Center Terpadu Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan	1 paket		-	-	-	-	1 pkt	2,5 M	1 pkt	2,5 M	1 pkt	2,5 M			Dishub



**BAB VI**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Jumlah arus penumpang (orang) yang terangkut melalui							
	a Angkutan Darat	10,636,128	11,167,934	11,726,331	12,312,648	12,928,280	13,574,694	13,574,694
	b Angkutan Laut	510,857	536,400	563,220	591,381	620,950	651,997	651,997
	c Angkutan SDP	115,298	121,063	127,116	133,472	140,145	147,153	147,153
	d Angkutan Udara	2,885,738	2,734,504	2,871,229	3,014,791	3,165,530	3,323,807	3,489,997
	e Angkutan Kereta Api	1,425,500	1,496,775	1,571,614	1,650,194	1,732,704	1,819,339	1,819,339
2	Jumlah ton barang yang terangkut melalui							
	a Angkutan Darat	9,705,112	10,190,368	10,699,886	11,234,880	11,796,624	12,386,456	12,386,456
	b Angkutan Laut	17,755,873	18,643,667	19,575,850	20,554,642	21,582,375	22,661,493	22,661,493
	c Angkutan SDP	169,103	177,558	186,436	195,758	205,546	215,823	215,823
	d Angkutan Udara	13,553	10,982	11,532	12,108	12,714	13,349	14,016
	e Angkutan Kereta Api	14,070,108	14,773,613	15,512,294	16,287,909	17,102,304	17,957,419	17,957,419
3	Prosentase izin yang dikeluarkan	10%	12%	14%	15%	17%	18%	18%
4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	40%	50%	55%	60%	65%	75%	90%
5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis							
	a Pelabuhan Penyeberangan	1 pelabuhan	1	1	1	1	1	1
	b Pelabuhan Laut	0 pelabuhan	40%	55%	70%	85%	100%	100%
	c Pelabuhan Udara	3 bandara	3	3	3	3	4	4
	d Terminal Type A	7 terminal	7	7	7	7	7	7
6	Jumlah kendaraan wajib uji	75,789	79,578	83,557	87,735	92,122	96,728	96,728